



**ELASTISITAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2011-2018**

SKRIPSI

Oleh :

Febrianzah Adi Wijaksono

NIM 150810101077

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**ELASTISITAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2011-2018**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Febrianzah Adi Wijaksono

NIM 150810101077

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Hindun dan Ayahanda Alm. MATKAHAR tercinta;
2. Kepada Kakak Saya Anton Nyoto P. S.E., yang selalu memberi motivasi dan semangat;
3. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMK, dan Bapak/Ibu Dosen yang terhormat di Universitas Jember;
4. Almamater yang kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTO

“If you can't do great things, do small things in a great way”

(Napoleon Hill)

“Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, akan membosankan kalau sampai menyesalinya dikemudian hari”

(Franky)

“If you do not take control over your time and your life, other people will gobble it up. If you don't prioritize yourself, you constantly start falling lower and lower on your list”

(Mischell Obama)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Febrianzah Adi Wijaksono

NIM : 150810101077

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Elastisitas Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2011-2018” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Februari 2020

Yang menyatakan,

Febrianzah A.W
NIM 150810101077

SKRIPSI

**ELASTISITAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2011-2018**

Oleh :

Febrianzah Adi Wijaksono

NIM 150810101077

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. P. Edi Suswandi, M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Fajar Wahyu P, SE., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ELASTISITAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI INDONESIA TAHUN 2011-2018

Nama Mahasiswa : Febrianzah Adi Wijaksono
NIM : 150810101077
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 20 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. P. Edi Suswandi, M.P.

Fajar Wahyu P, SE., M.E.

NIP. 195504251985031001

NIP. 198103302005011003

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ELASTISITAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2011-2018**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Febrianzah Adi Wijaksono

NIM : 150810101077

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

20 Februari 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. (.....)
NIP. 196306141990021001
2. Sekertari : Aisah Jumiaty, S.E., M.P. (.....)
NIP. 196809261994032002
3. Anggota : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)
NIP. 19604121987021001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 x 6

Warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19710727199512101

ELASTISITAS UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2011-2018

Febrianzah Adi Wijaksono

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar tingkat elastisitas upah minimum provinsi (UMP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan lembaga instansi yang terkait. Jenis penelitian adalah korelasional dan regresi yang bertujuan mengetahui apakah ada hubungan antar variabel dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum provinsi (UMP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan *Fixed effect* dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat elastisitas upah minimum cenderung masuk kategori inelastis dan berpengaruh tidak signifikan dengan probabilitas 0,0603 lebih besar dari tingkat signifikansinya $\alpha = 0,05$ (5%). Sedangkan tingkat elastisitas produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung masuk kategori inelastis positif dan berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansinya $\alpha = 0,05$ (5%), berarti setiap kenaikan nilai 1 persen pada produk domestik regional bruto akan menyebabkan kenaikan jumlah tenaga kerja yang terserap kurang dari 1 persen.

Kata Kunci : Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi

*ELASTICITY OF MINIMUM WAGES AND GROSS REGIONAL DOMESTIC
PRODUCT ON EMPLOYMENT IN INDONESIA 2011-2018*

Febrianzah Adi Wijaksono

*Departement of Economic and Developemnt Studies, Faculty of Economics and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

The study aims to determine the of level elasticity of minimum wage and gross regional domestic product on employment in Indonesia. The data used are secondary data obtained from the office of National Statistics Institution and other related institution. This type of research is correlational and regression which aims to find out wheater there is relationship between variabel where the variables used in this study are minimum wage, and gross regional domestic product (GRDP) on employment in Indonesia. The method used in this study is panel data with the Fixed Effect Approach and is associated with descriptive analysis. Based on the result of the study show that the level of elasticity of minimum wage on labor absorb is mostly in the inelastic positive category and the not significant effect with a probability of 0,0603 greater than the significant level $\alpha = 5\%$. While the level of elasticity of gross regional product on employment is mostly in the inelastic positive category and the significant effect with a probability of 0,0000 less tahn the significance level = 5%, maining that each 1 percent increase in gross regional domestic product will cause an increase of less than 1 percent of labor absorbed.

Keywords: Elasticity of employment, Gross Regional Domestic Product, Minimum Wage

RINGKASAN

Dalam berbagai kajian ilmiah, pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan seluruh perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*disparitas*) dan pengangguran (Todaro & Smith, 2014:113). Pembangunan ekonomi sendiri merupakan serangkaian usaha pada suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dengan tujuan menciptakan infrastruktur lebih banyak tersedia. Tujuan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara adalah untuk menciptakan pembangunan yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh tiap masyarakat, yakni dengan perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sehingga diharapkan kedepannya kesempatan kerja bertambah, tingkat pendidikan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan.

Indonesia sebagai negara berpendudukan terbesar ke lima di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 265,0 juta jiwa pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia besar sehingga berpotensi untuk menggerakkan pembangunan di negara Indonesia. Namun sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dapat pula menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja, ketika peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja di pasar kerja bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja tersebut, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Studi ini meneliti tentang elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun

2011-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), buku literatur, jurnal penelitian terdahulu, serta lembaga instansi lain yang terkait sebagai pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan dalam metode yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews-9. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Uji statistik menggunakan koefisien determinan (R^2), pengujian simultan (Uji F), dan Pengujian Parsial (Uji-t), dan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Penelitian ini yaitu, elastisitas upah minimum cenderung masuk dalam kategori inelastis dan berpengaruh tidak signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0603 lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05 ($\alpha = 5\%$). Elastisitas produk domestik regional bruto cenderung masuk dalam kategori inelastis positif dan berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikannya yaitu 0,05 ($\alpha = 5\%$). Perbandingan elastisitas upah minimum provinsi (UMP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) cenderung banyak masuk dalam zona 3 dan zona 4.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung masuk dalam kategori inelastis. Artinya penambahan upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto masih tergolong kurang optimal dalam penyerapan tenaga kerja.

PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Upah Minimum Provinsi dan PDRB di Indonesia Tahun 2011-2018”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. P. Edi Suswandi, M.P., selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E., selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama kuliah;
4. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember;
5. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember;
6. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M.,Ak.,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Seluruh guru-guru saya dari Sekolah dasar sampai Sekolah Menengah, serta guru mengaji saya;

9. Orang Tua terbaik, ibunda yang terbaik Hindun dan Ayahanda Alm.MATKAHAR yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan tanpa henti untuk penulis;
10. Kakakku Anton N.P beserta keluarga besar, terimakasih telah memberikan dukungan serta arahan yang baik dalam kelancaran penulisan skripsi ini;
11. Teman Teman Kuliah Irfan Basori, Reza Nugroho, Ria Budi Tama, Muh. Nurul Huda, Dicky Candra Permana, Alfin Kurniawan, Fauzi, dan Teman IESP angkatan 2015 yang telah menemani masa kuliah dan masa penulisan dan memberikan banyak dukungan;
12. Terima kasih kepada sahabat tercinta yang telah mengisi hari-hari dan membantu memberikan dorongan akan kelulusan penulis Nadia Melinda T.S, Yusup Abdillah Purnomo, dan Isna Hartatik
13. Teman-teman KKN 22 Desa Sukowiryo Kabupaten Jember , terimakasih telah memberikan sebuah pengalaman hidup berupa kebersamaan, kekeluargaan dan solidaritas;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 25 Jan 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	iii
MOTO	iv
PERNYATAAN.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Tenaga Kerja	6
2.1.2. Konsep Tenaga Kerja.....	7
2.1.3. Penyerapan Tenaga Kerja	8
2.1.4. Penawaran Tenaga Kerja	9
2.1.5. Permintaan Tenaga Kerja	12
2.1.6. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja.....	14
2.1.7. Produk Domestik Bruto	16
2.1.8. Teori Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.9. Upah.....	20

2.1.10. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	22
2.1.11. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ..	23
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Konseptual	29
2.4. Hipotesis Penelitian	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Jenis dan Sumber Data	32
3.3. Metode Pengumpulan Data	32
3.4. Metode Analisis Data	33
3.4.1. Analisis Regresi Data Panel	33
3.4.2. Uji Spesifikasi	35
3.4.2.1. Uji Chow	35
3.4.2.2. Uji Hausman	36
3.4.2.3. Uji LM	37
3.4.3. Uji Statistik	37
3.4.3.1. Uji Serentak (Uji F)	37
3.4.3.2. Uji Individual (uji t)	38
3.4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)	39
3.4.4. Pengujian Asumsi Klasik	40
3.4.4.1. Uji Normalitas	40
3.4.4.2. Uji Multikolinieritas	41
3.4.4.3. Uji Heteroskedastisitas	41
3.4.5. Definisi Operasional	41
BAB 4. PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum	43
4.1.1. Keadaan Geografis	43
4.1.2. Demografi	44
4.1.3. Keadaan Perekonomian Indonesia	45
4.2. Gambaran Umum Variabel Penelitian	46
4.2.1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	46

4.2.2.	Perkembangan Upah Minimum di Indonesia.....	48
4.2.3.	Produk Domestik Regional Bruto.....	50
4.3.	Hasil dan Analisis Data	51
4.3.1.	Pemilihan Model Estimasi	51
4.3.1.1.	Uji Chow	51
4.3.1.2.	Uji Hausman.....	52
4.3.1.3.	Uji LM.....	53
4.3.2.	Hasil Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model	54
4.4.	Uji Statistik.....	55
4.4.1.	Uji F Simultan.....	55
4.4.2.	Uji t (Secara Parsial)	56
4.4.3.	Koefisien Determinasi Berganda (Uji R^2)	57
4.5.	Hasil Uji Asumsi Klasik	57
4.5.1.	Uji Normalitas.....	57
4.5.2.	Uji Multikolinieritas	58
4.5.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.6.	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja antar Provinsi	59
4.6.1.	Perbandingan Elastisitas PDRB dan Upah Minimum Provinsi.....	62
4.7.	Pembahasan	65
4.7.1.	Elastisitas Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	67
4.7.2.	Elastisitas PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	68
BAB 5.	KESIMPULAN	70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2010-2018.....	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1. Indikator Kependudukan di Negara Indonesia 2010-2018.....	45
Tabel 4.2. Uji Chow.....	52
Tabel 4.3 Uji Hausman.....	53
Tabel 4.4 Uji LM.....	54
Tabel 4.5 Hasil Regres Data Panel.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	56
Tabel 4.7. Hasil Uji t.....	56
Tabel 4.8. Hasil Uji R.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.11. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2018.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kurva <i>Backward Bending Supply</i>	10
Gambar 2.2. Kurva Kekakuan Upah.....	21
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1. Peta Negara Indonesia.....	45
Gambar 4.2. Persentase GDP tahun 2010-2018.....	47
Gambar 4.3. Hasil Uji Normalitas.....	58
Gambar 4.4. Perbandingan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Antar Provinsi di Indonesia 2011-2018.....	64
Gambar 4.5. Persebaran Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Data Panel	77
Lampiran A. Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2018	84
Lampiran B. Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2018	85
Lampiran C. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Tahun 2011-2018	86
Lampiran D. Uji Chow	87
Lampiran E. Uji Hausman	88
Lampiran F. Uji LM	89
Lampiran G. Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	90
Lampiran H. Hasil Uji Normalitas	91
Lampiran I. Hasil Uji Multikolinieritas	91
Lampiran J. Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
Lampiran K. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2018	93
Lampiran L. Perbandingan Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum di Indonesia Tahun 2011-2018	97
Lampiran M. Persebaran Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2018	98

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam berbagai kajian ilmiah, pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan seluruh perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas) dan pengangguran (Todaro & Smith, 2014:113). Pembangunan ekonomi sendiri merupakan serangkaian usaha pada suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dengan tujuan menciptakan infrastruktur lebih banyak tersedia. Dalam Endys (2016:1) menurut Sukirno (2006) tujuan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara adalah untuk menciptakan pembangunan yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh tiap masyarakat, yakni dengan perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sehingga diharapkan kedepannya kesempatan kerja bertambah, tingkat pendidikan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan.

Indonesia sebagai negara berpendudukan terbesar ke lima didunia, dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 265,0 juta jiwa pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia besar sehingga berpotensi untuk menggerakkan pembangunan di negara indonesia. Namun sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dapat pula menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja, ketika peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja di pasar kerja bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja tersebut, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pengangguran (BPS, 2019).

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia pada tahun 2010-2018

Tahun	Penduduk (juta jiwa)	Angkatan Kerja (juta jiwa)	
		Bekerja	Pengangguran
2010	238,5	108,2	8,3
2011	242,0	109,7	7,7
2012	245,4	110,8	7,2
2013	248,8	110,8	7,4
2014	252,2	114,6	7,2
2015	255,5	114,8	7,6
2016	258,7	118,4	7,0
2017	261,9	121,0	7,0
2018	265,0	124,0	7,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (*data diolah*)

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa pengangguran tertinggi pada tahun 2010 yakni sebesar 8,3 juta jiwa, dan berfluktuasi pada tahun berikutnya, namun pada tahun 2015, jumlah pengangguran kembali meningkat menjadi sebesar 7,6 juta jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2018 angkatan kerja yang bekerja sebesar 124,0 juta jiwa. Data di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang ada masih belum mampu memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga kerja. Kurangnya jumlah lapangan kerja yang tersedia menjadi alasan utama dari permasalahan tenaga kerja.

Kurangnya jumlah lapangan kerja menjadi alasan utama dari permasalahan tenaga kerja. Akibat kurangnya lapangan kerja menyebabkan tidak semua masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan, yaitu (a) tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi serta distribusi barang dan jasa, (b) tenaga kerja sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Adanya kedua fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan (Suroto, 1992:28).

Pembahasan mengenai tenaga kerja berkaitan dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat disebut juga dengan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang diserap dan digunakan dalam suatu unit usaha tertentu untuk menjalankan proses produksi. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan upah minimum tenaga kerja. Adanya kesempatan kerja tersebut, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan, hendaknya kesempatan kerja dapat berjalan beriringan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat dengan pesat, sementara jumlah pengangguran juga semakin meningkat dikarenakan kesempatan kerja yang berkurang.

Upah Memiliki hubungan terbalik dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga apabila upah meningkat akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.. Dalam Juniardi (2017:7) menurut Alghofari (2010), ditinjau dari sisi pengusaha, naik turunnya tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi. Kaitannya adalah apabila upah sedang mengalami kenaikan maka akan meningkatkan biaya produksi dikarenakan tenaga kerja memiliki motivasi untuk melakukan produksi yang lebih sehingga biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tinggi, dengan adanya peningkatan biaya inilah akhirnya barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkatkan biaya harga per unit. Sehingga konsumen akan mengurangi penggunaan barang dan jasa, akibatnya barang-barang atau jasa yang tidak terjual akan menurunkan target produksi yang akan berpengaruh juga terhadap pengurangan tenaga kerja. Dalam Endys (2016:61) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Upah minimum dapat memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja apabila tenaga kerja apabila tenaga kerja tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi,

sedangkan upah minimum akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja apabila tenaga kerjanya memiliki tingkat pendidikan rendah. Sehingga apabila upah naik maka akan menurunkan permintaan terhadap kerja yang tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi.

Selain upah, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu Negara atau Daerah. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hukum Okun (*Okun's Law*) merupakan hubungan positif antara penyerapan tenaga kerja dan GDP, yang mengacu pada kenaikan dalam penerapan tenaga kerja 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan dalam GDP riil yang mendekati 1 persen.

Dari latar belakang diatas untuk mengetahui apakah besarnya pertambahan upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, maka peneliti membahas mengenai “Elastisitas Upah Minimum Provinsi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja ?
2. Bagaimana perbandingan tingkat elastisitas antara upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah-masalah diatas ingin yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tingkat elastisitas antara upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :

Secara akademik manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan lebih mendalam mengenai elastisitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Bagi Pemerintah Pusat dapat menjadi sumber informasi dan memantau tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tenaga Kerja

Secara umum pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja dapat diukur dengan usia dan orang yang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Sumarsono (2009: 2-3) tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang dapat bekerja dan dapat memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu menghasilkan barang atau jasa secara ekonomis yang dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi bahkan untuk masyarakat luas. Secara fisik untuk mengukur kemampuan tenaga kerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dapat dianggap mampu bekerja.

Tenaga kerja dapat didefinisikan bahwa penduduk yang usia 15 tahun keatas yang dapat menghasilkan barang atau jasa dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling tidak 1 jam dalam seminggu yang lalu tidak terputus. Tenaga kerja man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (menganggur). Menurut Dumairy (1996:74) tenaga kerja (Man Power) dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu angkatan kerja (laour force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja yang kegiatannya bersekolah (pelajar/mahasiswa), mengurus rumah tangga maksudnya ibu-ibu yang

bukan wanita karir, penerima pendapatan yang dimaksud adalah (pensiunan atau penderitaan cacat) tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Tenaga kerja = angkatan kerja + bukan angkatan kerja

Tenaga kerja atau (*man power*) adalah kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang dan jasa untuk diri sendiri ataupun orang lain (Winardi, 1994: 19). Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dalam pengolahan dan pelaksanaan industry dalam mengolah suatu barang, selain itu tenaga kerja merupakan kunci pertumbuhan usaha bagi suatu perusahaan karena dalam hal ini tenaga kerja mampu mengembangkan industry kecil menjadi industry besar. Sumber daya manusia merupakan sarana utama dari pelaksana dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Secara teoritis tenaga kerja adalah energi-energi manusia yang dikerahkan untuk tujuan tertentu yang diketahui dengan sadar.

Teori Klasik menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa (Mulyadi, 2003:47). Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolah sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.2. Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan modal penggerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlansungnya proses demografi, tenaga kerja merupakan penduduk dengan batas umur minimal 15 tahun tanpa batas maksimal. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan saling berkaitan. Keterkaitan itu mencakup tenaga kerja dengan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-

Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Permasalahan pokok dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional adalah prestasi full employment dan perbaikan struktur hidup masyarakat. Dipihak lain alat kebijakan ekonomi belanja dimaksudkan untuk membantu dalam menentukan jumlah permintaan tenaga kerja. Sementara kebijakan makro ekonomi menentukan jumlah kesempatan tenaga kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan dapat menambah efektifnya penggunaan kebijakan fiskal, moneter dan anggaran belanja dengan menyediakan secara tepat guna sumber daya untuk kesempatan kerja yang maksimum maupun untuk menyelesaikan masalah struktur. Program-program ketenagakerjaan jika digunakan bersama dengan kebijakan fiskal dan moneter dapat mengurangi masalah struktur yang bercirikan adanya pengangguran yang tinggi (Basir Barthos, 2004).

2.1.3. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah terimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau tersedianya lapangan pekerjaan untuk di isi pencari kerja (Todaro, 2003). Secara umum, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi faktor faktor sebagai berikut: a. jumlah penduduk, b. tenaga kerja, c. jam kerja, d. pendidikan, e. produktivitas, f. struktur umum (simanjuntak, 1998: 27). Menurut Priyanto (1990; 60) penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja disemua sektor ekonomi. Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau unit usaha tertentu. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah rill dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan permintaan tenaga kerja (Koncoro, 2002), dari banyaknya lapangan kerja yang terisi tercermin dari banyaknya pertumbuhan

penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian sehingga menyebabkan permintaan akan tenaga kerja.

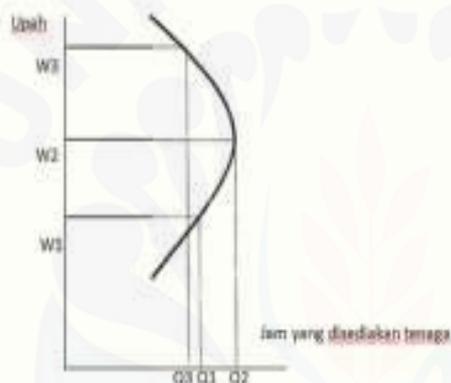
Secara umum penyerapan tenaga kerja menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah produk baik barang maupun jasa, dimana besarnya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing sektor yang berbeda (Sumarsono, 2003:80). Setiap penduduk yang terserap akan menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing masing sektor dan terjadinya perubahan sektoral baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap pendapatan nasional (Simanjuntak, 1998:78). Maka untuk memenuhi penyerapan tenaga kerja secara maksimal perlunya wadah seperti pasar tenaga kerja agar peran keduanya saling berkesinambungan sehingga terealisasinya untuk menghasilkan baik barang maupun jasa. Maka peran pasar dalam pasar tenaga kerja yaitu menjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah dapat terlaksana pada tujuan masing masing.

Menurut Sumarsono (2009:9), pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari para pelaku yang bertujuan adalah mempertemukan pencari pekerja dan lowongan kerja. Sifat dari pasar kerja itu sendiri ditentukan oleh pelaku tersebut. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu sebagai sarana saluran tenaga kerja, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja/ orang dengan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja yaitu dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, dapat membantu orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja dan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

2.1.4. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang ingin

bekerja atau tidak. Keputusan ini bergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (konsumtif), atau kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Hal tersebut menyebabkan bentuk dari kurva penawaran membelok ke kiri yang dikenal dengan *backward bending supply curve* (Sonny Sumarsono, 2003:12)



Gambar 2.1 Kurva *Backward bending supply*

Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Misalkan seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi (w). Pada tingkat upah diatas upah resevasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Keadaan selanjutnya akan berubah jika seseorang kesejahteraannya sudah baik atau mempunyai suatu keahlian yang lebih dan jumlah jam kerja yang ditawarkan semakin berkurang pada saat upah meningkat yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Kurva ini disebut kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang (*backward bending labour supply curve.*) Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja (Juniardi, 2018:12) yaitu:

1) Jumlah penduduk

Makin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang tersedia baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja dengan demikian jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar.

2) Struktur Umur Penduduk

Indonesia termasuk dalam struktur umur muda, ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk indonesia. Meskipun penambahan penduduk dapat ditekan tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja, dengan demikian penawaran tenaga kerja juga akan bertambah

3) Produktivitas

Produktifitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Secara umum produktifitas tenaga kerja merupakan fungsi daripada pendidikan, teknologi, dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan atau keterampilan tenaga kerja maka semakin tinggi pendidikan atau keterampilan tenaga kerja maka semakin meningkat produktivitas tenaga kerja.

4) Tingkat Upah

Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan pada kurva penawaran tenaga kerja yang *berslope* positif

5) Kebijakan Pemerintah

Dalam menelaah penawaran tenaga kerja maka memasukkan kebijakan pemerintah kedalamnya adalah sangat relevan. Misalnya kebijakan pemerintah dalam hal belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja, dan ada batas umur kerja menjadi lebih tinggi. Dengan demikian terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja.

6) Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam satu keluarga harus bekerja semua apabila pendekatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, atau seseorang mahasiswa yang tamat tidak mau bekerja karena perekonomian orang tua sangat memadai, atau seorang istri tidak perlu bekerja karena perekonomian suami sudah mencukupi.

Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi (Sukirno,2009)

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow Swan didasarkan pada pandangan klasik yaitu perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan maksimal dari faktor-faktor produksinya sehingga perekonomian terus berkembang. Menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio*) tidak tetap. Artinya, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda.

2.1.5. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang bersedia dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai

jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dalam aliran ekonomi yang kemudian dikenalkan sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat akan dipengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut: Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai *slope negatif*.

2. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya untuk maksud tersebut maka perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

3. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antar tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha/perusahaan untuk dipekerjakan, ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang itu memberikan nikmat/kegunaan (*utility*) kepada pihak pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang untuk memproduksi barang untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya (Simanjuntak,2011) dalam (Juniardi, 2018:16).

2.1.6. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Duamiry (2004; 220), konsep elastisitas sebenarnya adalah penerapan ekonomi dari teori diferensiasi dalam matematika. Elastisitas dari suatu fungsi $y = f(x)$ berkenaan dengan x dapat didefinisikan

$$e = \frac{Ey}{Ex} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta y/y)}{\Delta x/x} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y}$$

Ini berarti bahwa elastisitas $y = f(x)$ merupakan limit dari rasio antar perubahan relative dalam y terhadap perubahan relative dalam x , untuk perubahan x yang sangat kecil atau mendekati nol. Dengan terminology lain, elastisitas y terhadap x

dapat juga dikatakan sebagai rasio antar persentase perubahan y terhadap persentase perubahan x .

Menurut Case dan Fair (2007) dalam ilmu ekonomi, dengan logika sederhana kita dapat mengetahui bagaimana perubahan dalam suatu variabel, seperti harga barang atau tingkat bunga cenderung mempengaruhi perilaku. Begitu juga dalam upah tenaga kerja. Jika upah suatu sektor mengalami peningkatan maka permintaan terhadap tenaga kerja disektor tersebut juga akan meningkat begitu juga sebaliknya, jika upah mengalami penurunan maka akan terjadi pengangguran tenaga kerja disetiap sektor ekonomi tersebut. Hal ini akan memberikan dampak terhadap tenaga kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Koefisien elastisitas upah tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut; yaitu persentase pertumbuhan tenaga kerja Sektoral pertahun dibandingkan dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pertahun. Rumus Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas } P_{tk} = \frac{\% \text{Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja}}{\% \text{Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Bruto)}}$$

Secara umum elastisitas adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besar pengaruh variabel terhadap variabel yang lain dalam kurun waktu tertentu dengan nilai koefisien elastisitas berkisar tanda minus (-) atau plus (+) sering diabaikan karena nilai yang negative dikarenakan perubahan variabel yang satu ke variabel yang lain adalah menggambarkan perubahan kearah yang berbalikan.

Dengan mengadopsi konsep elastisitas, analisis perubahan tenaga kerja akibat perubahan upah tenagakerja akan digolongkan menjadi tiga jenis tipe elastisitas yaitu elastis, inelastis, dan uniter. Pada kasus elastisitas upah tenaga kerja. Penjelasan kategori elastisitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Elastis sempurna adalah apabila pertumbuhan jumlah tenaga kerja akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi penambahan upah. Nilai koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga (∞).
2. Inelastis sempurna adalah perubahan upah tidak mengubah pertumbuhan jumlah tenaga kerja walaupun penambahan upah mengalami kenaikan atau penurunan. Nilai koefisien elastisitasnya adalah 0 (nol).
3. Uniter adalah elastisitas yang mempunyai koefisien elastisitas permintaan sebesar 1 (satu). Elastisitas ini menggambarkan keadaan apabila laju pertumbuhan upah akan sebanding dengan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja.

2.1.7. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto sebagai nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu daerah atau negara selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun ditambah hasil produksi barang dan jasa yang berada pada konsumen tingkat akhir. Adapun nilai tambah yang terjadi merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dikonsumsi oleh tingkat akhir (Widodo, 1990). Menurut deliarnov (1995) PDRB dibedakan menjadi dua yaitu:

1. PDRB atas harga konstan merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.
2. PDRB atas harga yang berlaku merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada tahun bersangkutan.

Berikut ini terdapat tiga pendekatan cara menghitung PDRB dengan menggunakan metode langsung (Taringan, 2007) yaitu :

1. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang maupun

jasa yang diproduksi didalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan, maka total keseluruhan dari produksi barang dan jasa tersebut digunakan untuk konsumsi:

- a. Rumah tangga
- b. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan;
- c. Konsumsi pemerintah
- d. Pembentukan modal tetap bruto (investasi);
- e. Perubahan stok
- f. Ekspor netto (total ekspor dikurangi impor)

2. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi merupakan cara penentuan pendapatan regional yang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian. Oleh karena untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan pendekatan langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai produksi dari masing masing sektor tersebut.

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan PDRB kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dari pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

Mankiw (2006:248), Hukum Okun adalah relasi negative antara pengangguran dan GDP. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (*Okun's Law*) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan

dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

2.1.8. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik melihat dari segi penawaran. Menurut teori yang dikembangkan Abramovist dan Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan (Sadono Sukirno, 2010) :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan :

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan barang modal

ΔL = tingkat pertumbuhan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara matematik untuk menunjukkan kesimpulan sebagai berikut :

$$g = m \cdot \Delta K + b \cdot \Delta L + \Delta T$$

Keterangan :

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan barang modal

ΔL = tingkat pertumbuhan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertumbuhan teknologi

g = tingkat persentase pertumbuhan ekonomi

m = produktivitas modal marginal

b = produktivitas marginal tenaga kerja

Persamaan diatas pada hakekatnya menyatakan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bergantung pada :

- a) Pertambahan modal dan produktifitas modal marginal
- b) Pertambahan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja marginal
- c) Perkembangan teknologi

Sumbangan terpenting dari teori neo-klasik bukan dalam hal menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi kemungkinan menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penelitian empiris untuk menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Teori Keynes

Menurut Keynes semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar jumlah pekerjaan yang dihasilkan, demikian juga sebaliknya. Jumlah pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang-barang dan jasa yang diminta tersebut, yang ada dalam perekonomian. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi.

Investasi menengahi antara pendapatan dan konsumsi. Jika jumlah investasi yang dibutuhkan tidak terpenuhi maka harga permintaan akan turun lebih rendah dari pada harga penawaran agregat. Akibatnya pendapatan dan konsumsi akan turun sampai ditengahi oleh investasi. Jumlah investasi bergantung pada efesiensi marginal dari modal dan suku bunga.

Teori Harold-Domar

Model pertumbuhan Harrold-Domar merupakan model hubungan ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (*growth*) bergantung langsung pada tingkat tangbungan nasional neto(*saving*) dan berbanding terbalik dengan rasio modal output nasional (*capital*), (Todaro dan Smith, 2014:136). Teori ini pada hakekatnya berusaha menerangkan syarat yang

diperlukan agar suatu perekonomian mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) yaitu pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan alat-alat modal dan akan selalu dalam perekonomian. Dalam Teori ini pembentukan modal dipandang sebagai suatu pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambahkan permintaan efektif masyarakat (menaikan pendapatan nasional). Menurut Harrold-Domar ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya stock modal (K) dan jumlah produksi nasional (Y).

2.1.9. Upah

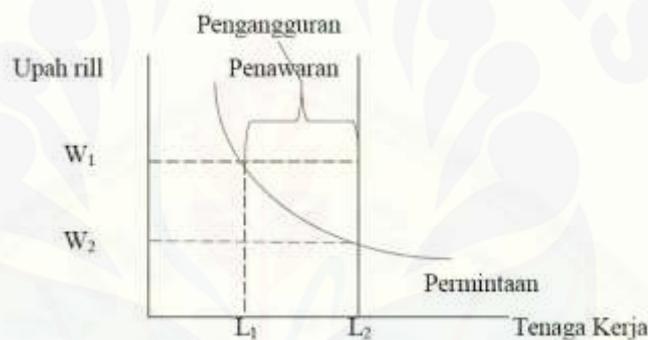
Menurut Gilarso dalam alghofari (2010:49), balas jasa untuk faktor produktif tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah rill (jumlah barang dan jasa dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan upah untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan.

Teori Klasik menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor-faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan nilai marginal dari faktor produksi tersebut, dengan kata lain tenaga kerja memperoleh upah senilai dengan pertumbuhan hasil marginalnya.

Kebijakan dalam pemberlakuan dan peningkatan upah rill berpengaruh negatif sebab dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Adanya tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan tarif kesejahteraan kaum buruh, disisi lain (pengusaha) justru berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan jika

UMK meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini akan berakibat berkurangnya tenaga kerja (Juniardi, 2017:23)

Menurut Mankiw (2012), rendahnya penyerapan tenaga kerja terjadi akibat adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu tidak mampunya upah dalam melakukan penyesuaian sampai titik ekuilibrium, dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. rendahnya penyerapan tenaga kerja yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah tenaga kerja yang diinginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia.



Gambar 2.2. Kurva Kekakuan Upah

Berdasarkan asumsi bahwa penerapan kebijakan mengenai upah minimum sebesar (W_1) di atas tingkat keseimbangan yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Upah tidak akan turun ke W_2 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W_1 , karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjaannya menjadi L_1 sehingga timbul pengangguran sebesar L_2 dikurangi (L_1) (Mankiw, 2007:370).

Dalam hal ini aspek upah menjadi penting, karena penghargaan (upah) akan menjadi efektif diharapkan dapat memberikan sumbangan pada terpeliharanya kelangsungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada

akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada (Salvatore dalam Juniardi, 2017).

Jhon Maynard Kernes (1883-1946) berpendapat bahwa kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah

2.1.10. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa adanya kaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah sehingga secara teori peningkatan ini menandakan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Dornbusch, *et al* (2001:89) menyatakan output nasional (berbagai representasi dari pertumbuhan ekonomi) merupakan fungsi dari modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang dicapai. Faktor penting yang memengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara teoritis juga ditunjukkan melalui Hukum Okun. Menurut Mankiw (2007:249-251). Hukum Okun adalah relasi negative antara pengangguran dan GDP. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (*Okun's Law*) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain,, Hukum Okun menggambarkan apabila PDB meningkat sebesar 2 persen maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mendorong penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya masalah

pengangguran dan kemiskinan yang bias berujung pada timbulnya ketidakstabilan social. Sementara penyerapan tenaga kerja yang tidak mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menciptakan gangguan dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.11. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut teori upah alami, tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*skilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sehingga apabila tingkat upah berada diatas kebutuhan hidup pekerja, akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akhirnya justru menurunkan permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, peningkatan upah minimum mempengaruhi permintaan tenaga kerja, yakni dapat mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja yang tidak terdidik atau kurang berpengalaman (Mankiw, 2003:79). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai koefisien dari upah minimum untuk semua tenaga kerja adalah negatif kecuali tenaga kerja terdidik atau profesional (Endys, *et al.* 2016:33).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai disparitas ekonomi telah banyak dilakukan, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juniardi Putra Harianto pada tahun 2018 yang berjudul “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2017” dengan menggunakan alat analisis Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja sektoral di provinsi jawa timur lebih banyak yang inelastic, namun pada sektor pertanian , kehutan dan perikanan masuk dalam kategori elastic.hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut tidak terlalu respon pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Farah Nadya Hudzaifatul Mukarromah pada tahun 2018 yang berjudul “Penyerapan Tenaga kerja di Indonesia Tahun 2010-2015” dengan menggunakan metode analisis Regresi Data Panel. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, namun Investasi (PMDN) dan (PMA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Penelitian ini dilakukan oleh A.A.I.N Marhaeni, Ni Wayan Yuni Lestari pada tahun 2016 yang berjudul “Elastisitas Kesempatan Tenaga kerja Sektoral di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” dengan menggunakan metode analisis statistic deskriptif dan *Analisis of Varians*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kondisi elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali masih bervariasi terlihat pada sektor primer rata rata elastisitas -1,353 persen , sektor sekunder 0.903 persen, dan sektor tersier 1,060 persen; 2). Perkembangan elastisitas kesempatan tenaga kerja terlihat fluktuatif; 3) ada perbedaan signifikan kesempatan tenaga kerja sektoral (primer, sekunder, tersier) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Noviana Dwi Haryanti pada tahun 2017 yang berjudul “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Jawa Timur Periode 2011-2015” dengan menggunakan metode *Panel Least Square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri di beberapa subsektor bersifat elastis, dan 3 diantara mengalami inelastis yaitu subsektor batu bara dan penggalian minyak, subsektor pengolahan tembakau, dan subsektor industri logam.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Putri Ersya Rizky Ramadhani pada tahun 2017 yang berjudul “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 2011-2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Elastisitas kesempatan kerja bersifat elastis dan Nilai Produksi pada sektor kecil di Kabupaten Jember pada tahun 2011-2016 mengalami peningkatan.
6. Penelitian ini dilakukan oleh Anton Trianto pada tahun 2016 yang berjudul “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga lebih masuk dalam kategori inelastis, sedangkan perbandingan elastisitas antar Kabupaten/Kota berbeda-beda setiap tahunnya.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Juniardi Putra Harianto (2018)	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2017	Pertumbuhan ekonomi (PDRB) sektoral, dan rata rata tingkat upah upah sektoral	Penelitian ini menggunakan Regresi data panel	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja sektoral di provinsi jawa timur lebih banyak yang inelastic, namun pada sektor pertanian , kehutan dan perikanan masuk dalam kategori elastic.hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut tidak terlalu ,erespon pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja.
2	Farah Nadya Hudzaifatu l Mukarrom ah (2018)	Penyerapan Tenaga kerja di Indonesia Tahun 2010-2015	Penyerapan Tenaga Kerja,Upah Minimum Provinsi, Investasi (PMDN), Investasi (PMA), dan (PDRB)	Penelitian ini menggunakan Regresi data panel	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, namun Investasi (PMDN) dan (PMA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia

3	A.A.I.N Marhaeni, Ni Wayan Yuni Lestari (2016)	Elastisitas Kesempatan Tenaga kerja Sektoral di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Jumlah tenaga kerja, kesempatan tenaga kerja, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB	Penelitian ini menggunakan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan <i>analysis of varians</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kondisi elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali masih bervariasi terlihat pada sektor primer rata rata elastisitas -1,353 persen, sektor sekunder 0.903 persen, dan sektor tersier 1,060 persen; 2). Perkembangan elastisitas kesempatan tenaga kerja terlihat fluktuatif; 3). Tidak ada perbedaan signifikan elastisitas kesempatan tenaga kerja menurut wilayah pembangunan; 4) ada perbedaan signifikan kesempatan tenaga kerja sektoral (primer, sekunder, tersier) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
4	Noviana Dwi Haryanti (2017)	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Jawa Timur Periode 2011-2015	Tenaga Kerja, dan PDRB	Penelitian ini menggunakan Metode <i>Panel Least Square</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri di beberapa subsektor bersifat elastis, dan 3 di antaranya mengalami inelastis yaitu subsektor batu bara dan penggalian minyak, subsektor pengolahan tembakau, dan subsektor industri logam.
5	Putri Ersya Rizky Ramadhani (2017)	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 2011-2016	Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Produksi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Elastisitas kesempatan kerja bersifat elastis dan Nilai Produksi pada sektor kecil di Kabupaten Jember pada tahun 2011-2016 mengalami peningkatan.

6	Anton Trianto) (2016	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan	PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2011-2015 elastisitas tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak masuk kategori inelastis, sedangkan perbandingan elastisitas antar Kabupaten/ Kota selalu berbeda beda.
---	-------------------------	--	----------------------------------	--	---



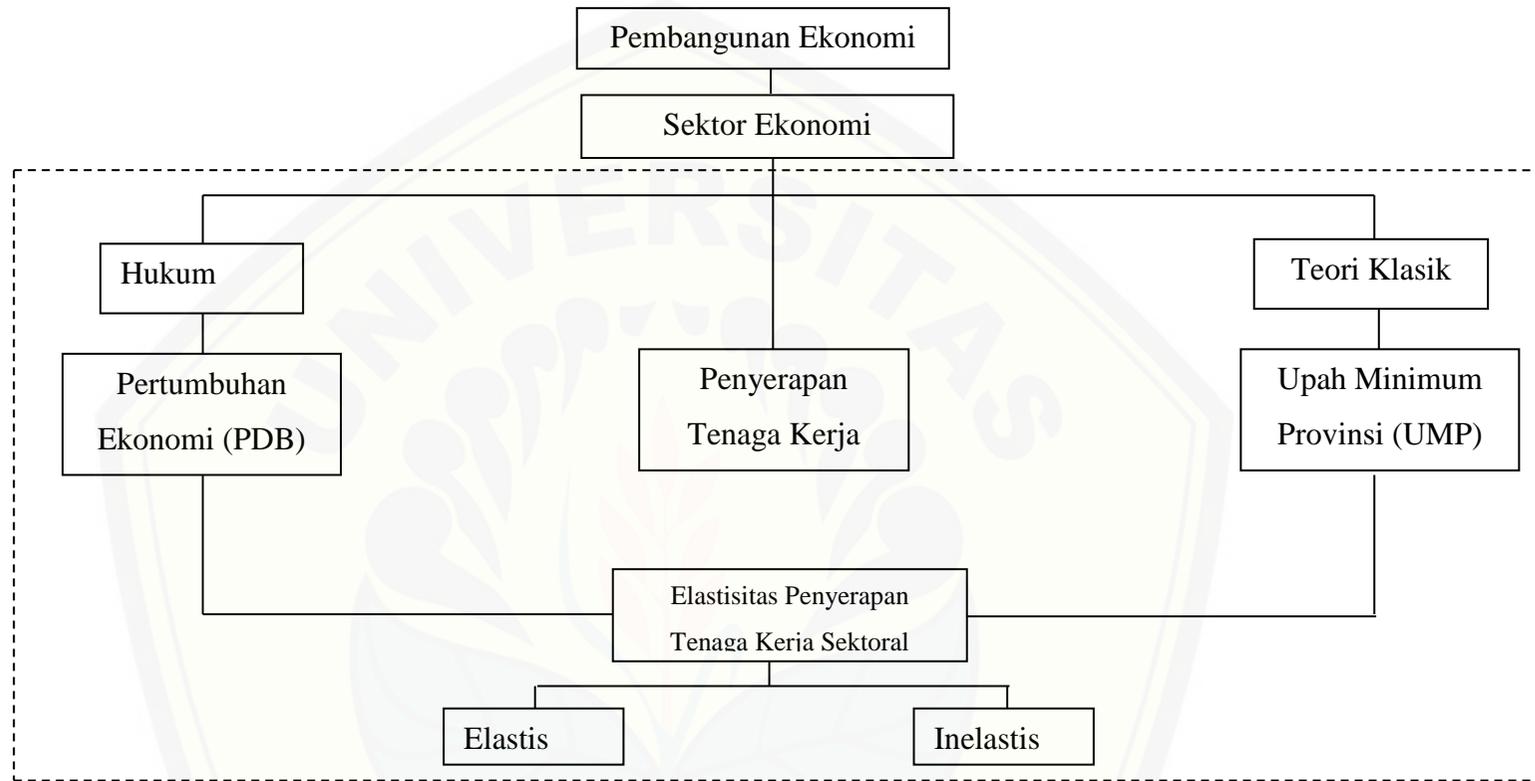
2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menunjukkan alur berfikir secara konseptual yang terfokus pada tujuan dilaksanakan suatu penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Kerangka konseptual dapat diturunkan baik dari teori-teori yang mendasari penelitian kemudian diturunkan kedalam variabel-variabel yang terait dengan penelitian hingga dapat dirumuskan alur berfikir secara konseptual mengenai penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. dengan didukung gabungan-gabungan sektor ekonomi yang terdiri dari 9 sektor ekonomi meliputi :

- 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian
- 3) Sektor Industri Pengolahan
- 4) Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air
- 5) Sektor Konstruksi
- 6) Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel
- 7) Sektor Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Sektor Keuangan, Asuransi, dan Usaha Persewaan
- 9) Sektor Jasa-jasa

PDRB adalah Penjumlahan nilai output akhir perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi (9 sektor) disuatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dan dalam satu kurun aktu tertentu. Sektor-sektor tersebut memiliki peran sebagai daya dukung yang tangguh dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan laju pertumbuhan antar provinsi di Indonesia serta berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Apabila dilihat bahwa alokasi sumber daya manusia (tenaga kerja) yang efektif adalah awal dari pertumbuhan ekonomi (PRDB) di suatu wilayah. Dari perbandingan laju pertumbuhan tenaga kerja (Δl) dengan laju pertumbuhan ekonomi (Δy), maka bisa dilihat elastisitas penyerapan tenaga kerja disuatu negara ($ePtk$). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.3. Kerangka Konsep

Keterangan :

—————

: Kaitan Kajian Teoritis

: Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa Pembangunan ekonomi disebabkan karena adanya aktifitas sektor-sektor ekonomi yang dikerjakan oleh tenaga kerja, dimana tenaga kerja memberikan tenaganya guna menghasilkan baik barang maupun jasa guna mendapatkan upah. Sedangkan sektor-sektor ekonomi mendapatkan keuntungan dari hasil produksi tersebut. Sehingga peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data panel.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori-teori penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Elastisitas upah minimum provinsi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga di Indonesia 2011-2018.
2. Elastisitas Produk domestik regional bruto signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia 2011-2018.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah korelasional dan regresi. Analisis korelasi mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan analisis regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh tersebut (Juniardi, 2017). Variabel pada penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB), dan rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja di Negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dimana dalam penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan menghitung statistik, dikarenakan data yang berwujud angka-angka.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari pihak atau instansi lain, biasanya data ini disajikan dalam bentuk tahun yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Indonesia serta berasal dari hasil studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu serta surfing melalui internet mengenai data pada rentang waktu 2011-2018. Alasan dipilihnya periode tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan perubahan atas dasar tahun yang terjadi pada perhitungan data PDRB.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini pengumpulan data yang digunakan melalui pendekatan kepustakaan (*Libary Research*), yakni dilakukan dengan mendapatkan data sekunder yang berasal dari data instansi yang terkait yaitu : Badan Pusat Statistik dan Sakernas.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Dengan kata lain data panel adalah data yang diperoleh dari *cross section* yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Gujarati, 2012:238). Apabila setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut sebagai *balanced panel*

Untuk mencari tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja dipergunakan persamaan sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \ln \alpha_{it} + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 \ln X2_{it} + e_{it}$$

Dimana :

$\ln Y$	= Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
$\ln X1$	= Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP)
$\ln X2$	= Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
α	= Intercept
β_1	= Elastisitas upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja
β_2	= Elastisitas produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja
i	= Provinsi di Negara Indonesia
t	= Waktu

Dimana pada model ini diasumsikan bahwa pengaruh dari variabel dari setiap individu berlainan. Model ekonometri disusun sebagai berikut:

$$\ln Y = \alpha_1 + \alpha_2 D1 + \alpha_2 D2 + \alpha_3 D3 + \alpha_4 D4 + \alpha_5 D5 + \alpha_6 D6 + \alpha_7 D7 + \alpha_8 D8 + \alpha_9 D9 + \alpha_{10} D10 + \alpha_{11} D11 + \alpha_{12} D12 + \alpha_{13} D13 + \alpha_{14} D14 + \alpha_{15} D15 + \alpha_{16} D16 + \alpha_{17} D17 + \alpha_{18} D18 + \alpha_{19} D19 + \alpha_{20} D20 + \alpha_{21} D21 + \alpha_{22} D22 + \alpha_{23} D23 + \alpha_{24} D24 + \alpha_{25} D25 + \alpha_{26} D26 + \alpha_{27} D27 + \alpha_{28} D28 + \alpha_{29} D29 + \alpha_{30} D30 + \alpha_{31} D31 + \alpha_{32} D32 + \beta_1 \ln X1 +$$

$$\begin{aligned} & \beta_2 \ln X_2 + y_1(D1 \ln X_{1t}) + y_2(D2 \ln X_{1t}) + y_3(D3 \ln X_{1t}) + y_4(D4 \ln X_{1t}) + y_5(D5 \ln X_{1t}) + y_6(D6 \ln X_{1t}) \\ & + y_7(D7 \ln X_{1t}) + y_8(D8 \ln X_{1t}) + y_9(D9 \ln X_{1t}) + y_{10}(D10 \ln X_{1t}) + y_{11}(D11 \ln X_{1t}) \\ & + y_{12}(D12 \ln X_{1t}) + y_{13}(D13 \ln X_{1t}) + y_{14}(D14 \ln X_{1t}) + y_{15}(D15 \ln X_{1t}) + y_{16}(D16 \ln X_{1t}) + y_{17}(D17 \ln X_{1t}) \\ & + y_{18}(D18 \ln X_{1t}) + y_{19}(D19 \ln X_{1t}) + y_{20}(D20 \ln X_{1t}) + y_{21}(D21 \ln X_{1t}) + y_{22}(D22 \ln X_{1t}) + y_{23}(D23 \ln X_{1t}) \\ & + y_{24}(D24 \ln X_{1t}) + y_{25}(D25 \ln X_{1t}) + y_{26}(D26 \ln X_{1t}) + y_{27}(D27 \ln X_{1t}) + y_{28}(D28 \ln X_{1t}) + y_{29}(D29 \ln X_{1t}) \\ & + y_{30}(D30 \ln X_{1t}) + y_{31}(D31 \ln X_{1t}) + y_{32}(D32 \ln X_{1t}) + y_{33}(D1 \ln X_{2t}) + y_{34}(D2 \ln X_{2t}) + y_{35}(D3 \ln X_{2t}) + y_{36}(D4 \ln X_{2t}) + y_{37}(D5 \ln X_{2t}) \\ & + y_{38}(D6 \ln X_{2t}) + y_{39}(D7 \ln X_{2t}) + y_{40}(D8 \ln X_{2t}) + y_{41}(D9 \ln X_{2t}) + y_{42}(D10 \ln X_{2t}) + y_{43}(D11 \ln X_{2t}) \\ & + y_{44}(D12 \ln X_{2t}) + y_{45}(D13 \ln X_{2t}) + y_{46}(D14 \ln X_{2t}) + y_{47}(D15 \ln X_{2t}) + y_{48}(D16 \ln X_{2t}) + y_{49}(D17 \ln X_{2t}) \\ & + y_{50}(D18 \ln X_{2t}) + y_{51}(D19 \ln X_{2t}) + y_{52}(D20 \ln X_{2t}) + y_{53}(D21 \ln X_{2t}) + y_{54}(D22 \ln X_{2t}) + y_{55}(D23 \ln X_{2t}) \\ & + y_{56}(D24 \ln X_{2t}) + y_{57}(D25 \ln X_{2t}) + y_{58}(D26 \ln X_{2t}) + y_{59}(D27 \ln X_{2t}) + y_{60}(D28 \ln X_{2t}) + y_{61}(D29 \ln X_{2t}) \\ & + y_{62}(D30 \ln X_{2t}) + y_{63}(D31 \ln X_{2t}) + y_{64}(D32 \ln X_{2t}) + e_{it} \end{aligned}$$

Bahwa y adalah koefisien slope diferensial, kemudian $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6, \alpha_7, \alpha_8, \alpha_9, \alpha_{10}, \alpha_{11}, \alpha_{12}, \alpha_{13}, \alpha_{14}, \alpha_{15}, \alpha_{16}, \alpha_{17}, \alpha_{18}, \alpha_{19}, \alpha_{20}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \alpha_{23}, \alpha_{24}, \alpha_{25}, \alpha_{26}, \alpha_{27}, \alpha_{28}, \alpha_{29}, \alpha_{30}, \alpha_{31}, \alpha_{32}$ adalah intersep diferensial. D1 sebagai *dummy* Provinsi Aceh, D2 sebagai *dummy* Provinsi Sumatera Utara, D3 sebagai *dummy* Provinsi Sumatera Barat. D4 sebagai *dummy* Provinsi Riau, D5 sebagai *dummy* Provinsi Kepulauan Riau, D6 sebagai *dummy* Provinsi Jambi, D7 sebagai *dummy* Provinsi Sumatera Selatan, D8 sebagai *dummy* Provinsi Kepulauan Bangka, D9 sebagai *dummy* Provinsi Bengkulu, D10 sebagai *dummy* Provinsi Lampung, D11 sebagai *dummy* Provinsi Jawa Barat, D12 sebagai *dummy* Provinsi Banten, D13 sebagai *dummy* Provinsi Jawa Tengah, D14 sebagai *dummy* Provinsi D.I Yogyakarta, D15 sebagai *dummy* Provinsi Jawa Timur, D16 sebagai *dummy* Provinsi Bali, D17 sebagai *dummy* Provinsi Bali, D18 sebagai *dummy* Provinsi NTB, D19 sebagai *dummy* Provinsi NTT, D20 sebagai *dummy* Provinsi Kalimantan Barat, D21 sebagai *dummy* Provinsi Kalimantan Tengah, D22 sebagai *dummy* Provinsi Kalimantan Selatan, D23 sebagai *dummy* Provinsi Kalimantan Timur, D24 sebagai *dummy* Provinsi Sulawesi Utara, D25 sebagai *dummy* Provinsi Gorontalo, D26 sebagai *dummy* Provinsi Sulawesi Tengah, D27 sebagai

dummy Provinsi Sulawesi Selatan, D28 sebagai *dummy* Provinsi Sulawesi Barat, D 29 sebagai *dummy* Provinsi Sulawesi Tenggara, D30 sebagai *dummy* Provinsi Maluku, D31 sebagai *dummy* Provinsi Maluku Utara, D31 sebagai *dummy* Provinsi Papua, D32 sebagai *dummy* Provinsi Papua Barat. Jika satu atau lebih lebih dari koefisien y signifikan secara statistik, itu akan memberitahukan bahwa satu atau lebih slope koefisien berbeda dari kelompok basis. Misalnya, katakanlah β_{WG} dan y_1 signifikan secara statistik. Dalam kasus $(\beta X_1 + y_1)$ akan memberikan nilai koefisien kemiringan X_1 untuk Provinsi Aceh, menunjukkan bahwa koefisien Provinsi Aceh slope X_1 berbeda dari Provinsi D.K.I Jakarta (Gujarati, 2003:645).

Terdapat beberapa metode mendasar yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Sebelum dilakukan pengestimasian model penelitian, dilakukan uji spesifikasi untuk menganalisis apakah menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman (Widarjono, 2009;:231-240).

3.4.2. Uji Spesifikasi

3.4.2.1. Uji Chow

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel *dummy* sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau metode *Common Effect* (Mahulete, 2016). Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*deggre of freedom*) sebanyak m untuk *numerator* dan sebanyak $n - k$ untuk *denominator*. m merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

3.4.2.2. Uji Hausman

Hausman telah dilakukan untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut (Mahulete, 2016).

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul

diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* (Ekananda,2015:405).

3.4.2.3. Uji LM

Uji LM dilakukan untuk memilih model mana yang tepat antara *common effect* dengan *random effect* digunakan signifikan LM. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model Common Effect

H_1 : Model Random Effect

Kriteria Pengujiamtua adalah sebagai berikut :

1. Jika *Probabilitas hitung* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan lebih menggunakan CEM (*Common Effect Model*).
2. Jika *Probabilitas hitung* < 0.05 maka H_0 ditolak dan lebih menggunakan REM (*Random Effect Model*).

3.4.3. Uji Statistik

Menurut Gujarati (1995) bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk meolak H_0 dibuat berdasarkan nilai uji sattistik yang diperoleh berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statitik terdiri dari pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), pengujian koefisien parsial (uji t), dan pengujian koefiesn determinasi (uji- R^2).

3.4.3.1. Uji Serentak (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan :

- 1) $H_0 : b_1, b_2, = 0$ semua variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.
- 2) $H_1 : b_1, b_2, \neq 0$ semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Menurut Ghozali (2014) nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana :

- F : Pengujian secara bersama-sama
- R^2 : Koefisien determinasi berganda
- k : banyaknya variabel
- n : banyaknya observasi (sampel)
- k-1 : derajat bebas pembilang
- n-k : derajat bebas penyebut

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a) Bila F hitung \leq F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- b) Bila F hitung \geq tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.4.3.2. Uji Individual (uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

- 1) $H_0 : b_1 = 0$ ($i = 1,2$) tidak ada pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah minimum provinsi dengan penyerapan tenaga kerja.
- 2) $H_1 : b_1 \neq 0$ ($i = 1,2$) ada pengaruh positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah minimum provinsi dengan penyerapan tenaga kerja.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus :

$$t = \frac{b_i - b_i^*}{SE(b_i)}$$

dimana :

- b_i : parameter yang diestimasi
- b_i^* : nilai hipotesis dari b_i ($H_0 : b_i = b_i^*$)
- $SE(b_i)$: simpangan baku b_i

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika t-hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2014) bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.4.4. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, variasi, dan *degree of freedom* (Gujarati, 2012:237). Keunggulan-keunggulan data panel mampu mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*. Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik. (Gujarati 1992 dalam Kurnia (2015)). Namun Peneliti akan memaparkan pengujian asumsi klasik sebagai pelengkap.

3.4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2014). Terdapat beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang akan dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B Hitung < nilai X^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual distribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah :

$$J - B \text{ hitung} = \left[S^2/6 + \left(\frac{k - 3}{24} \right) \right]$$

dimana :

S : Skewness statistic

K : kurtosis

Jika nilai J-B hitung $>$ J-B tabel, maka hipotesis menyatakan bahwa sesidual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

3.4.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Adanya kemungkinan terdapat multikolinieritas yaitu : apabila nilai F signifikan tetapi statistik t tidak ada yang signifikan, nilai R^2 tinggi namun banyak t-statistik yang tidak signifikan atau apabila koefisien korelasi antara dua variabel bebas lebih besar 0.80 maka kolinieritas berganda merupakan masalah serius (Dr. Mahyus Ekananda, 2016:95).

3.4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian metode Uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel dependen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Wing Wahyu, 2015) :

3.4.5. Definisi Operasional

Langkah selanjutnya setelah menspesifikasikan variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini mempunyai tujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini didefinisikan operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran yang disebut *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi sektoral di Indonesia dalam satuan Miliar rupiah

2. Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang sedang bekerja atau memproduksi barang dan jasa. Data yang dipergunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama, 2017
3. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dalam berbagai sektor ekonomi. Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam penelitian diwakilkan oleh jumlah penduduk yang bekerja dalam satu periode menurut lapangan usaha
4. Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Dahulu Upah minimum dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat I (UMR).
5. Elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah persentase jumlah tenaga kerja yang bekerja dibandingkan dengan persentase upah minimum atau presentase produk domestik regional bruto

BAB 5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2011-2018 cenderung masuk dalam kategori inelastis. Hal ini berarti perubahan tingkat upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto selama periode tersebut tidak terlalu mendorong respon penyerapan tenaga kerja, hal ini karena persentase penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari persentase tingkat upah minimum provinsi ataupun tingkat produk domestik regional brutonya. Pada beberapa provinsi yang mengalami elastisitas upah minimum provinsi yang berkategori elastis yaitu Sumatera utara, Jambi, sedangkan elastisitas produk domestik regional bruto yang berkategori elastis hanya pada provinsi Sumatera utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan tengah.
2. Perbandingan tingkat elastisitas upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada provinsi Sulawesi tenggara, Sulawesi barat, Aceh, Sulawesi Tengah, Jambi kepekaan terhadap rangsangan perubahan tingkat upah minimum akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sebaliknya kepekaan terhadap perubahan produk domestik regional bruto justru menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja di provinsi tersebut. Pada Provinsi NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa tengah, D.K.I Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Bangka, Papua tidak terjadi kepekaan terhadap rangsangan upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto. Hal ini mungkin di akibatkan letak geografis,

dan kebutuhan hidup yang tinggi. Pada Provinsi Sumatera utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Barat, Banten, Papua Barat, Gorontalo, Lampung, NTB, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku utara, Bali, Sulawesi utara, Sumatera selatan kepekaan terhadap rangsangan perubahan produk domestik regional bruto akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sebaliknya rangsangan perubahan tingkat upah minimum provinsi akan cenderung menurunkan penyerapan tenaga kerja.

3. Elastisitas PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat inelastis dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2011-2018. Saat produk domestik regional bruto mengalami peningkatan sebanyak 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia kurang dari 1 persen
4. Elastisitas upah minimum provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat inelastis dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2011-2018

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dan dapat dikaitkan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka yang perlu disarankan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

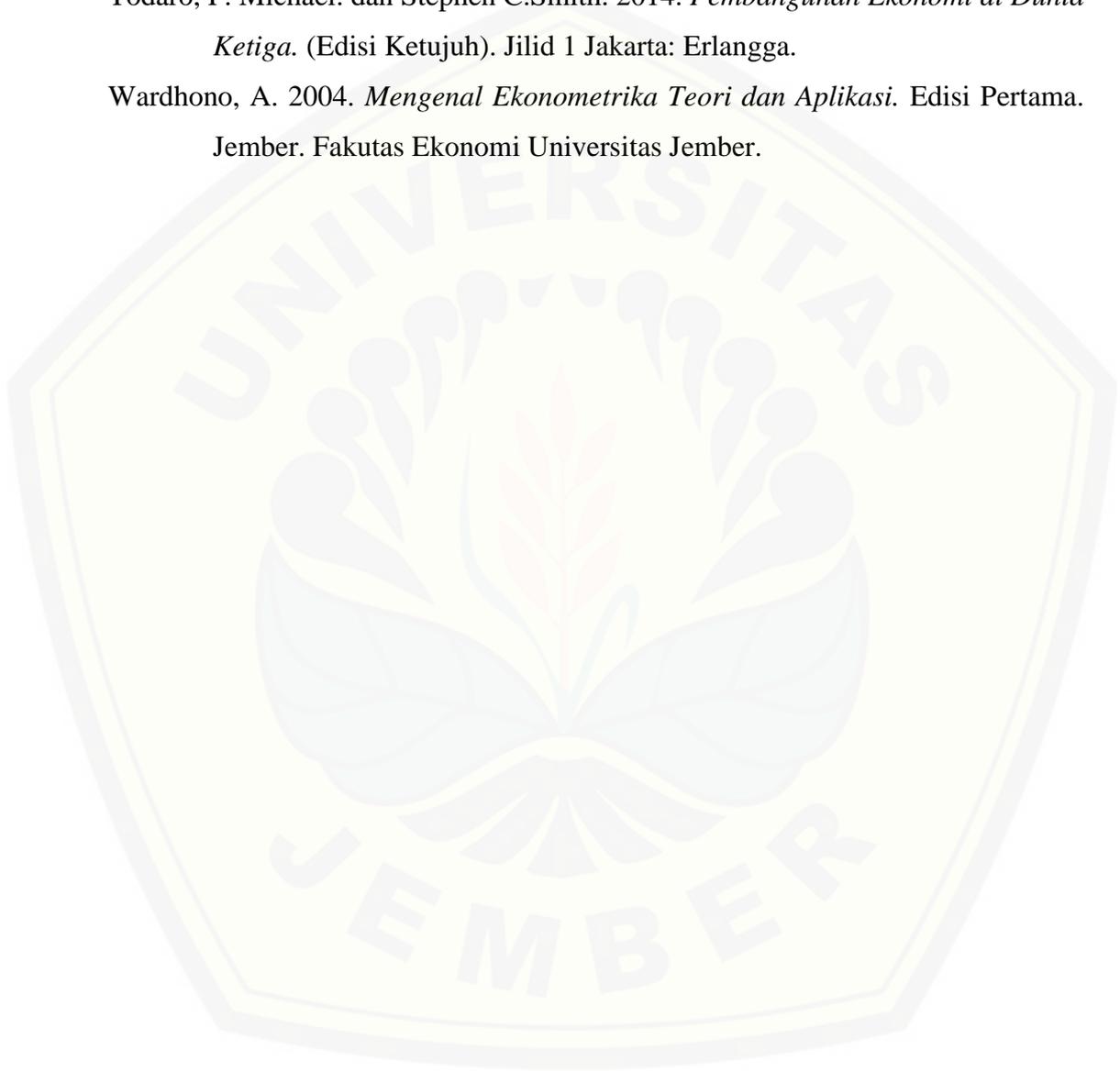
1. Standar penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia perlu dilakukan secara bijaksana dan disarankan perlu dengan pengkajian yang akurat. Hendaknya pemerintah daerah menyusun kebijakan pengupahan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak.
2. Perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan para pelaku usaha untuk menggalakan dan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada setiap sektor-sektor ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat elastisitas dari variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.I.N Maharhaeni, Ni Wayan Yuni Lestari, 2016, “Elastisitas Kesempatan Tenaga Kerja Sektoral di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” *Economic Development Jurnal University Udayana*.
- Badan Pusat Statistik. “*Statistical year book 2010-2019*”. Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. 2013. *Laporan Perekonomian Indonesia 2013*. BI. Jakarta
- Bruth, EJ. Jr. 1963. *Labor Market, Unions, and Government Policies*. St Martin’s Press, New York
- Case, dan Fair. 2007. *Prinsip Prinsip Ekonomi Mikro*, Edisi IX, (Alih Bahasa Berlian Muhamad). Jakarta: PT INDEKS
- Deliarnov. 195. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dornbusch, et al. 2001. *Macroeconomics*. 8th Edition. New York. McGraw-Hill Companies
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlanga.
- Dumairy. 2004. *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Ekananda, Mahyus. 2015. “*Ekonometrika Dasar Edisi pertama*”. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ghozali, Imam. 2014. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi IMB SPSS 22*. Senarang Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonomi Dasar*. Terjemah: Sumarsono Zain. Jakarta. Erlanga.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Terjemah: Mangunsong, R.C. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat, buku 2.
- Harianto, Juniardi Putra. P. Edi Suswandi. dan Fajar Wahyu P, 2018. “Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2017”, *Economic Development Analisis Jurnal* (2018). Universitas Jember.

- Harabi, Ibnu. Petrus Edi Suswandi. dan Endah Kurnia Lestari. 2018. “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur”
- Kuncuro, Haryono.2002. “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 7, Nomor, Hal 45-54.
- Mahulete, Ummi K. 2016. “Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mankiw, N Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi ke 5. Terjemah: Imam Nurmawan. Jakarta: Erlanga.
- Mankiw, N Gregory.2006. *Makroekonomi*, edisi keenam. Jakarta: Erlanga.
- Mankiw, N Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, edisi keenam. Jakarta. Erlanga.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*.Jakarta: Indeks.
- Paramasita, Endys Normala. Sunlip Wibisono. Dan Siswoyo Hari Santosa, 2016. “Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2008-2014”, *Economic Development Analisis Jurnal* (2016)
- Priyanto, W Suseno. 1990. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sari, Nita Pradana. Moehammad Fathorrazi. dan Zainuri. 2018. “Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB, dan Investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur 2010-2016.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumarsono, Sony. 2009. *Ekonomi Manajemen SDM Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sadono, Sukirno. 2009. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sadono, Sukirno 2010. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi-3. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak. Payman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Fakultas Ekonomi UI.

- Subri, Mulyadi 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Todaro, P. Michael. dan Stephen C.Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed). Jakarta: Erlanga.
- Todaro, P. Michael. dan Stephen C.Smith. 2014. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Edisi Ketujuh). Jilid 1 Jakarta: Erlangga.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.





LAMPIRAN

Lampiran Data Panel Penyerapan tenaga kerja, UMP, dan PDRB

Provinsi	Tahun	LnPtk (persen)	lnUMK (persen)	lnPDRB (persen)
DKI.Jakarta	2011	15,34	14,07	13,95
DKI.Jakarta	2012	15,39	14,24	14,02
DKI.Jakarta	2013	15,37	14,60	14,08
DKI.Jakarta	2014	15,35	14,71	14,13
DKI.Jakarta	2015	15,37	14,81	14,19
DKI.Jakarta	2016	15,40	14,95	14,25
DKI.Jakarta	2017	15,32	15,03	14,31
DKI.Jakarta	2018	15,37	15,11	14,37
Aceh	2011	14,43	14,12	11,56
Aceh	2012	14,40	14,15	11,60
Aceh	2013	14,42	14,25	11,62
Aceh	2014	14,47	14,38	11,64
Aceh	2015	14,49	14,46	11,65
Aceh	2016	14,55	14,57	11,66
Aceh	2017	14,58	14,73	11,71
Aceh	2018	14,61	14,81	11,75
Sumut	2011	15,59	13,85	12,77
Sumut	2012	15,57	14,00	12,84
Sumut	2013	15,59	14,13	12,90
Sumut	2014	15,59	14,22	12,95
Sumut	2015	15,60	14,30	13,00
Sumut	2016	15,61	14,41	13,05
Sumut	2017	15,67	14,49	13,10
Sumut	2018	15,72	14,57	13,15
Sumbar	2011	14,54	13,87	11,62
Sumbar	2012	14,53	13,96	11,68
Sumbar	2013	14,51	14,12	11,74
Sumbar	2014	14,59	14,21	11,80
Sumbar	2015	14,60	14,29	11,85
Sumbar	2016	14,67	14,40	11,91
Sumbar	2017	14,67	14,48	11,96
Sumbar	2018	14,70	14,57	12,01
Riau	2011	14,70	13,93	12,92
Riau	2012	14,69	14,03	12,96
Riau	2013	14,72	14,15	12,99
Riau	2014	14,74	14,35	13,01
Riau	2015	14,75	14,45	13,01

Riau	2016	14,83	14,56	13,04
Riau	2017	14,84	14,63	13,06
Riau	2018	14,89	14,72	13,09
Kep.Riau	2011	13,57	13,79	11,69
Kep.Riau	2012	13,62	13,83	11,72
Kep.Riau	2013	13,65	14,13	11,83
Kep.Riau	2014	13,62	14,33	11,89
Kep.Riau	2015	13,64	14,49	11,95
Kep.Riau	2016	13,66	14,59	12,00
Kep.Riau	2017	13,71	14,67	12,02
Kep.Riau	2018	13,71	14,76	12,07
Jambi	2011	14,18	13,84	11,49
Jambi	2012	14,17	13,95	11,56
Jambi	2013	14,14	14,08	11,62
Jambi	2014	14,21	14,22	11,70
Jambi	2015	14,25	14,35	11,74
Jambi	2016	14,30	14,46	11,78
Jambi	2017	14,32	14,54	11,82
Jambi	2018	14,36	14,62	11,87
Sumsel	2011	15,08	13,86	12,24
Sumsel	2012	15,08	13,99	12,30
Sumsel	2013	15,06	14,30	12,36
Sumsel	2014	15,12	14,42	12,40
Sumsel	2015	15,12	14,50	12,45
Sumsel	2016	15,20	14,61	12,49
Sumsel	2017	15,19	14,69	12,55
Sumsel	2018	15,19	14,77	12,61
Kep.Bangka	2011	13,29	13,84	10,55
Kep.Bangka	2012	13,28	13,92	10,60
Kep.Bangka	2013	13,30	14,05	10,65
Kep.Bangka	2014	13,31	14,31	10,70
Kep.Bangka	2015	13,34	14,56	10,74
Kep.Bangka	2016	13,44	14,67	10,78
Kep.Bangka	2017	13,42	14,75	10,82
Kep.Bangka	2018	13,46	14,83	10,86
Bengkulu	2011	13,68	13,61	10,32
Bengkulu	2012	13,63	13,74	10,38
Bengkulu	2013	13,59	14,00	10,44
Bengkulu	2014	13,67	14,12	10,50
Bengkulu	2015	13,71	14,22	10,55
Bengkulu	2016	13,78	14,29	10,60

Bengkulu	2017	13,75	14,37	10,65
Bengkulu	2018	13,78	14,45	10,70
Lampung	2011	15,06	13,66	11,99
Lampung	2012	15,05	13,79	12,05
Lampung	2013	15,03	13,96	12,10
Lampung	2014	15,12	14,15	12,15
Lampung	2015	15,11	14,27	12,20
Lampung	2016	15,18	14,38	12,25
Lampung	2017	15,18	14,46	12,30
Lampung	2018	15,22	14,55	12,36
Jabar	2011	16,68	13,50	13,78
Jabar	2012	16,72	13,57	13,84
Jabar	2013	16,73	13,65	13,90
Jabar	2014	16,77	13,81	13,95
Jabar	2015	16,75	13,82	14,00
Jabar	2016	16,77	14,09	14,06
Jabar	2017	16,84	14,17	14,11
Jabar	2018	16,85	14,25	14,17
Banten	2011	15,33	13,82	12,58
Banten	2012	15,34	13,86	12,65
Banten	2013	15,35	13,97	12,71
Banten	2014	15,40	14,10	12,76
Banten	2015	15,39	14,29	12,82
Banten	2016	15,44	14,39	12,87
Banten	2017	15,44	14,47	12,92
Banten	2018	15,49	14,56	12,98
Jateng	2011	16,58	13,42	13,39
Jateng	2012	16,60	13,55	13,45
Jateng	2013	16,59	13,63	13,50
Jateng	2014	16,62	13,69	13,55
Jateng	2015	16,61	13,72	13,60
Jateng	2016	16,62	13,96	13,65
Jateng	2017	16,66	14,13	13,70
Jateng	2018	16,66	14,21	13,75
DI. Yogya	2011	14,40	13,60	11,13
DI. Yogya	2012	14,44	13,70	11,18
DI. Yogya	2013	14,43	13,76	11,23
DI. Yogya	2014	14,49	13,78	11,28
DI. Yogya	2015	14,45	13,80	11,33
DI. Yogya	2016	14,53	13,93	11,38
DI. Yogya	2017	14,53	14,11	11,43

DI.Yogya	2018	14,57	14,19	11,49
Jatim	2011	16,76	13,47	13,87
Jatim	2012	16,76	13,52	13,93
Jatim	2013	16,77	13,67	13,99
Jatim	2014	16,78	13,76	14,05
Jatim	2015	16,78	13,82	14,10
Jatim	2016	16,77	14,06	14,16
Jatim	2017	16,82	14,14	14,21
Jatim	2018	16,83	14,23	14,26
Bali	2011	14,61	13,70	11,51
Bali	2012	14,63	13,78	11,58
Bali	2013	14,64	13,98	11,64
Bali	2014	14,64	14,25	11,71
Bali	2015	14,66	14,30	11,77
Bali	2016	14,70	14,41	11,83
Bali	2017	14,69	14,49	11,88
Bali	2018	14,73	14,57	11,95
NTB	2011	14,49	13,76	11,12
NTB	2012	14,50	13,82	11,13
NTB	2013	14,50	13,91	11,15
NTB	2014	14,55	14,01	11,20
NTB	2015	14,57	14,10	11,40
NTB	2016	14,68	14,21	11,46
NTB	2017	14,66	14,30	11,46
NTB	2018	14,58	14,42	11,47
NTT	2011	14,56	13,65	10,74
NTT	2012	14,56	13,74	10,80
NTT	2013	14,55	13,83	10,85
NTT	2014	14,59	13,96	10,90
NTT	2015	14,61	14,04	10,95
NTT	2016	14,64	14,17	11,00
NTT	2017	14,66	14,24	11,05
NTT	2018	14,70	14,32	11,10
Kalbar	2011	14,58	13,60	11,42
Kalbar	2012	14,56	13,71	11,47
Kalbar	2013	14,54	13,87	11,53
Kalbar	2014	14,62	14,14	11,58
Kalbar	2015	14,62	14,26	11,63
Kalbar	2016	14,64	14,37	11,68
Kalbar	2017	14,65	14,45	11,73
Kalbar	2018	14,67	14,53	11,78

Kalteng	2011	13,92	13,94	11,01
Kalteng	2012	13,88	14,10	11,08
Kalteng	2013	13,88	14,26	11,15
Kalteng	2014	13,96	14,36	11,21
Kalteng	2015	14,01	14,46	11,28
Kalteng	2016	14,04	14,54	11,34
Kalteng	2017	14,02	14,62	11,40
Kalteng	2018	14,08	14,70	11,46
Kalsel	2011	14,42	13,93	11,42
Kalsel	2012	14,42	14,02	11,48
Kalsel	2013	14,41	14,11	11,53
Kalsel	2014	14,44	14,30	11,58
Kalsel	2015	14,45	14,44	11,62
Kalsel	2016	14,49	14,55	11,66
Kalsel	2017	14,50	14,63	11,71
Kalsel	2018	14,52	14,71	11,76
Kaltim+Kulut	2011	14,28	13,90	13,01
Kaltim+Kulut	2012	14,30	13,98	13,06
Kaltim+Kulut	2013	14,30	14,38	13,09
Kaltim+Kulut	2014	14,33	14,45	13,09
Kaltim+Kulut	2015	14,17	14,52	13,10
Kaltim+Kulut	2016	14,27	14,59	13,10
Kaltim+Kulut	2017	14,25	14,67	13,14
Kaltim+Kulut	2018	14,30	14,75	13,17
Sulut	2011	13,81	13,86	10,91
Sulut	2012	13,77	14,04	10,98
Sulut	2013	13,76	14,25	11,04
Sulut	2014	13,80	14,46	11,10
Sulut	2015	13,82	14,58	11,16
Sulut	2016	13,92	14,69	11,22
Sulut	2017	13,86	14,77	11,28
Sulut	2018	13,91	14,85	11,34
Gorontalo	2011	13,01	13,54	9,72
Gorontalo	2012	13,01	13,64	9,80
Gorontalo	2013	13,02	13,98	9,87
Gorontalo	2014	13,08	14,10	9,94
Gorontalo	2015	13,11	14,29	10,00
Gorontalo	2016	13,21	14,44	10,07
Gorontalo	2017	13,17	14,52	10,13
Gorontalo	2018	13,23	14,61	10,19
Sulteng	2011	14,05	13,63	10,95

Sulteng	2012	13,97	13,69	11,04
Sulteng	2013	13,98	13,81	11,13
Sulteng	2014	14,07	14,04	11,18
Sulteng	2015	14,10	14,22	11,32
Sulteng	2016	14,19	14,33	11,42
Sulteng	2017	14,13	14,41	11,49
Sulteng	2018	14,19	14,49	11,55
Sulsel	2011	15,03	13,91	12,13
Sulsel	2012	15,03	14,00	12,22
Sulsel	2013	15,01	14,18	12,29
Sulsel	2014	15,08	14,40	12,36
Sulsel	2015	15,06	14,51	12,43
Sulsel	2016	15,12	14,63	12,50
Sulsel	2017	15,10	14,71	12,57
Sulsel	2018	15,14	14,79	12,64
Sulbar	2011	13,19	13,82	9,85
Sulbar	2012	13,22	13,94	9,94
Sulbar	2013	13,17	13,97	10,01
Sulbar	2014	13,30	14,15	10,09
Sulbar	2015	13,30	14,32	10,16
Sulbar	2016	13,34	14,44	10,22
Sulbar	2017	13,30	14,52	10,29
Sulbar	2018	13,34	14,60	10,35
Sul.Tenggara	2011	13,84	13,74	10,89
Sul.Tenggara	2012	13,79	13,85	11,00
Sul.Tenggara	2013	13,78	13,93	11,07
Sul.Tenggara	2014	13,85	14,15	11,13
Sul.Tenggara	2015	13,89	14,32	11,20
Sul.Tenggara	2016	14,01	14,43	11,26
Sul.Tenggara	2017	13,96	14,51	11,33
Sul.Tenggara	2018	14,00	14,59	11,39
Maluku	2011	13,38	13,71	9,88
Maluku	2012	13,32	13,79	9,95
Maluku	2013	13,30	14,06	10,00
Maluku	2014	13,31	14,16	10,07
Maluku	2015	13,39	14,32	10,12
Maluku	2016	13,45	14,39	10,18
Maluku	2017	13,37	14,47	10,23
Maluku	2018	13,46	14,61	10,29
Maluku Utara	2011	12,99	13,70	9,68
Maluku Utara	2012	13,00	13,78	9,75

Maluku Utara	2013	13,01	14,00	9,81
Maluku Utara	2014	13,03	14,18	9,86
Maluku Utara	2015	13,09	14,27	9,92
Maluku Utara	2016	13,13	14,34	9,98
Maluku Utara	2017	13,10	14,50	10,05
Maluku Utara	2018	13,15	14,66	10,13
Papua	2011	14,21	14,15	11,57
Papua	2012	14,24	14,28	11,59
Papua	2013	14,31	14,35	11,67
Papua	2014	14,30	14,53	11,71
Papua	2015	14,33	14,60	11,78
Papua	2016	14,33	14,71	11,87
Papua	2017	14,35	14,80	11,91
Papua	2018	14,39	14,91	11,98
Papua Barat	2011	12,73	14,16	10,67
Papua Barat	2012	12,74	14,19	10,70
Papua Barat	2013	12,78	14,36	10,77
Papua Barat	2014	12,84	14,44	10,83
Papua Barat	2015	12,85	14,52	10,87
Papua Barat	2016	12,91	14,62	10,91
Papua Barat	2017	12,91	14,70	10,95
Papua Barat	2018	12,94	14,80	11,01

Lampiran A. Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2018 (jiwa)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	1.852.473	1.798.547	1.824.586	1.931.823	1.966.018	2.087.045	2.138.512	2.203.717
Sumut	5.912.114	5.751.682	5.899.560	5.881.371	5.962.304	5.991.229	6.365.989	6.728.431
Sumbar	2.070.725	2.037.642	2.005.625	2.180.336	2.184.599	2.347.911	2.344.972	2.410.450
Riau	2.424.180	2.399.002	2.481.361	2.518.485	2.554.296	2.765.946	2.781.021	2.915.597
Kep.Riau	781.824	824.567	848.660	819.656	836.670	859.813	896.931	901.019
Jambi	1.434.998	1.423.624	1.382.471	1.491.038	1.550.403	1.624.522	1.657.817	1.721.362
Sumsel	3.553.104	3.532.932	3.464.620	3.692.806	3.695.866	3.998.637	3.942.534	3.963.870
Kep.bangka	589.634	583.102	596.786	604.223	623.949	686.830	672.618	701.366
Bengkulu	873.719	830.266	801.146	868.794	904.317	964.971	932.976	963.463
Lampung	3.482.301	3.449.307	3.385.046	3.673.158	3.635.258	3.931.321	3.896.230	4.060.377
DKI Jakarta	4.588.418	4.838.596	4.712.836	4.634.369	4.724.029	4.861.832	4.509.171	4.726.779
Jabar	17.454.781	18.321.108	18.413.984	19.230.943	18.791.482	19.202.038	20.551.575	20.779.888
Banten	4.529.660	4.605.847	4.637.019	4.853.992	4.825.460	5.088.497	5.077.400	5.332.496
Jateng	15.916.135	16.132.890	15.964.048	16.550.682	16.435.142	16.511.136	17.186.674	17.245.548
D.iYogya	1.798.595	1.867.708	1.847.070	1.956.043	1.891.218	2.042.400	2.053.168	2.118.392
Jatim	18.940.340	19.081.995	19.266.457	19.306.508	19.367.777	19.114.563	20.099.220	20.449.949
Bali	2.204.874	2.268.708	2.273.897	2.272.632	2.324.805	2.416.555	2.398.307	2.490.870
NTB	1.962.240	1.978.764	1.981.842	2.094.100	2.127.503	2.367.310	2.316.720	2.154.124
NTT	2.096.259	2.095.683	2.075.948	2.174.228	2.219.291	2.277.068	2.320.061	2.411.533
Kalbar	2.146.572	2.106.514	2.053.823	2.226.510	2.235.887	2.287.555	2.303.198	2.346.881
Kalteng	1.105.701	1.070.210	1.063.711	1.154.489	1.214.681	1.248.189	1.222.707	1.301.002
Kalsel	1.824.929	1.821.327	1.811.096	1.867.462	1.889.502	1.965.088	1.975.161	2.021.666
Kaltim	1.591.003	1.618.118	1.624.272	1.677.466	1.423.957	1.581.239	1.540.675	1.618.285
Sulut	990.720	957.292	946.852	980.756	1.000.032	1.110.564	1.040.826	1.095.145
Gorontalo	445.210	445.729	449.104	479.137	493.687	546.668	524.316	555.533
Sulteng	1.260.999	1.165.442	1.175.930	1.293.226	1.327.418	1.459.803	1.374.214	1.451.491
Sulsel	3.375.498	3.351.908	3.291.280	3.527.036	3.485.492	3.694.712	3.598.663	3.774.924
Sulbar	536.048	548.783	523.960	595.797	595.905	624.182	595.004	619.395
Sultenggara	1.026.548	975.879	968.949	1.037.419	1.074.916	1.219.548	1.160.974	1.207.488
Maluku	650.112	610.362	598.792	601.651	655.063	690.786	642.061	700.143
Malut	437.870	443.946	445.359	456.017	482.543	503.479	488.715	515.615
Papua	1.476.227	1.527.933	1.634.332	1.617.437	1.672.480	1.664.485	1.699.071	1.777.207
Papua Barat	336.588	341.741	353.619	378.436	380.226	402.360	402.526	417.544
Indonesia	109.670.399	110.808.154	110.804.041	114.628.026	114.819.199	118.411.973	121.022.423	124.004.950

Lampiran B. Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2018 (juta rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	1.350.000	1.400.000	1.550.000	1.750.000	1.900.000	2.118.500	2.500.000	2.700.000
Sumut	1.035.500	1.200.000	1.375.000	1.505.850	1.625.000	1.811.875	1.961.355	2.132.189
Sumbar	1.055.000	1.150.000	1.350.000	1.490.000	1.615.000	1.800.725	1.949.285	2.119.067
Riau	1.120.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	2.095.000	2.266.723	2.464.154
Kep. Riau	975.000	1.015.000	1.365.087	1.665.000	1.954.000	2.178.710	2.358.454	2.563.875
Jambi	1.028.000	1.142.500	1.300.000	1.502.300	1.710.000	1.906.650	2.063.949	2.243.719
Sumsel	1.048.440	1.195.220	1.630.000	1.825.000	1.974.346	2.206.000	2.388.000	2.595.995
Kep. Bangka	1.024.000	1.110.000	1.265.000	1.640.000	2.100.000	2.341.500	2.534.674	2.755.444
Bengkulu	815.000	930.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.605.000	1.737.413	1.888.741
Lampung	855.000	975.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000	1.763.000	1.908.448	2.074.673
DKI Jakarta	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.000	2.700.000	3.100.000	3.355.750	3.648.036
Jabar	732.000	780.000	850.000	998.000	1.000.000	1.312.355	1.420.624	1.544.361
Banten	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.385
Jateng	675.000	765.000	830.000	880.000	910.000	1.150.000	1.367.000	1.486.065
DI.Yogya	808.000	892.660	947.114	968.500	988.500	1.120.000	1.337.645	1.454.154
Jatim	705.000	745.000	866.250	950.000	1.000.000	1.280.000	1.388.000	1.508.895
Bali	890.000	967.500	1.181.000	1.542.600	1.621.172	1.807.600	1.956.727	2.127.157
NTB	950.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.330.000	1.482.950	1.631.245	1.825.000
NTT	850.000	925.000	1.010.000	1.150.000	1.250.000	1.425.000	1.525.000	1.660.000
Kalbar	802.500	900.000	1.060.000	1.380.000	1.560.000	1.739.400	1.882.900	2.046.900
Kalteng	1.134.580	1.327.459	1.553.127	1.723.970	1.896.367	2.057.558	2.227.307	2.421.305
Kalsel	1.126.000	1.225.000	1.337.500	1.620.000	1.870.000	2.085.050	2.258.000	2.454.671
Kaltim	1.084.000	1.177.000	1.752.073	1.886.315	2.026.126	2.161.253	2.339.556	2.543.332
Sulut	1.050.000	1.250.000	1.550.000	1.900.000	2.150.000	2.400.000	2.598.000	2.824.286
Gorontalo	762.500	837.500	1.175.000	1.325.000	1.600.000	1.875.000	2.030.000	2.206.813
Sulteng	827.500	885.000	995.000	1.250.000	1.500.000	1.670.000	1.807.775	1.965.232
Sulse	1.100.000	1.200.000	1.440.000	1.800.000	2.000.000	2.250.000	2.435.625	2.647.767
Sulbar	1.006.000	1.127.000	1.165.000	1.400.000	1.655.500	1.864.000	2.017.780	2.193.530
Sultenggara	930.000	1.032.300	1.125.207	1.400.000	1.652.000	1.850.000	2.002.625	2.177.052
Maluku	900.000	975.000	1.275.000	1.415.000	1.650.000	1.775.000	1.925.000	2.222.220
Malut	889.350	960.498	1.200.622	1.440.746	1.577.617	1.681.266	1.975.152	2.320.803
Papua	1.403.000	1.585.000	1.710.000	2.040.000	2.193.000	2.435.000	2.663.647	3.000.000
Papua Barat	1.410.000	1.450.000	1.720.000	1.870.000	2.015.000	2.237.000	2.421.500	2.667.000
INDONESIA	988.829	1.088.903	1.296.908	1.584.391	1.790.342	1.997.819	2.142.855	2.268.874

Lampiran C. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi, 2011-2018 (miliar rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	104.874	108.915	111.756	113.490	114.666	116.384	121.263	126.824
Sumut	353.148	375.924	398.727	419.573	440.956	463.775	487.531	512.766
Sumbar	111.680	118.724	125.941	133.341	140.719	148.134	155.964	163.995
Riau	410.216	425.626	436.188	447.987	448.992	458.997	471.420	482.087
Kepriau	118.961	123.035	137.264	146.325	155.131	162.924	166.198	173.689
Jambi	97.741	104.615	111.766	119.991	125.037	130.501	136.557	142.995
Sumsel	206.361	220.459	232.175	243.298	254.045	266.854	281.544	298.569
Kep.Bangka	38.014	40.105	42.191	44.159	45.962	47.851	50.008	52.212
Bengkulu	30.295	32.363	34.326	36.207	38.066	40.080	42.080	44.171
Lampung	160.438	170.769	180.620	189.797	199.537	209.814	220.657	232.214
DKI Jakarta	1.147.558	1.222.528	1.296.695	1.373.389	1.454.564	1.540.078	1.635.856	1.736.196
Jabar	965.622	1.028.410	1.093.544	1.149.216	1.207.232	1.275.528	1.342.935	1.419.689
Banten	290.546	310.386	331.099	349.351	368.377	387.824	409.960	433.884
Jateng	656.268	691.343	726.655	764.959	806.765	849.313	894.050	941.283
DI Yogya	68.050	71.702	75.625	79.536	83.474	87.688	92.301	98.027
Jatim	1.054.402	1.124.465	1.192.790	1.262.684	1.331.376	1.405.561	1.482.148	1.563.756
Bali	99.992	106.952	114.104	121.788	129.127	137.286	144.964	154.151
NTB	67.379	68.341	69.767	73.373	89.338	94.538	94.645	95.323
NTT	46.334	48.863	51.505	54.108	56.771	59.705	62.788	65.941
Kalbar	90.798	96.162	101.980	107.115	112.347	118.193	124.307	130.584
Kalteng	60.493	64.649	69.411	73.725	78.891	83.909	89.565	94.596
Kalsel	91.252	96.968	101.851	106.779	110.863	115.738	121.864	128.106
Kaltim	445.264	469.646	482.625	483.725	489.992	490.253	507.382	522.649
Sulut	54.911	58.678	62.422	66.361	70.425	74.771	79.495	84.259
Gorontalo	16.669	17.987	19.368	20.776	22.069	23.508	25.093	26.723
Sulteng	56.834	62.250	68.219	71.678	82.787	91.053	97.552	103.618
Sulsel	185.709	202.185	217.589	233.988	250.803	269.423	288.909	309.244
Sulbar	19.028	20.787	22.227	24.196	25.964	27.525	29.362	31.177
Sultenggara	53.547	59.785	64.269	68.292	72.964	77.748	83.038	88.329
Maluku	19.597	21.000	22.101	23.568	24.859	26.284	27.812	29.465
Malut	16.003	17.120	18.209	19.209	20.380	21.557	23.211	25.050
Papua	106.067	107.891	117.119	121.391	130.312	142.221	148.824	159.729
Papua Barat	42.867	44.423	47.694	50.360	52.346	54.711	56.907	60.454
Indonesia	7.286.915	7.735.786	8.177.822	8.603.636	9.033.169	9.499.730	9.996.207	10.526.756

Lampiran D. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1049.701952	(32,229)	0.0000
Cross-section Chi-square	1318.698407	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LNPTK
Method: Panel Least Squares
Date: 02/23/20 Time: 12:36
Sample: 2011 2018
Periods included: 8
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.29037	1.042568	14.66607	0.0000
LNUMK	-0.686642	0.072010	-9.535433	0.0000
LNPDRB	0.760606	0.021716	35.02450	0.0000
R-squared	0.831224	Mean dependent var		14.48636
Adjusted R-squared	0.829931	S.D. dependent var		0.996525
S.E. of regression	0.410961	Akaike info criterion		1.070663
Sum squared resid	44.08007	Schwarz criterion		1.111299
Log likelihood	-138.3275	Hannan-Quinn criter.		1.086992
F-statistic	642.7151	Durbin-Watson stat		0.041521
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran E. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	74.992977	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNUMK	0.048272	-0.075849	0.000337	0.0000
LNPDRB	0.271374	0.555535	0.001798	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LNPTK

Method: Panel Least Squares

Date: 02/23/20 Time: 12:37

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.60213	0.336282	31.52744	0.0000
LNUMK	0.048272	0.025566	1.888120	0.0603
LNPDRB	0.271374	0.056342	4.816556	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998857	Mean dependent var	14.48636
Adjusted R-squared	0.998688	S.D. dependent var	0.996525
S.E. of regression	0.036103	Akaike info criterion	-3.681982
Sum squared resid	0.298477	Schwarz criterion	-3.207898
Log likelihood	521.0217	Hannan-Quinn criter.	-3.491481
F-statistic	5886.823	Durbin-Watson stat	1.489457
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran F. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	647.2276 (0.0000)	42.84830 (0.0000)	690.0759 (0.0000)
Honda	25.44067 (0.0000)	6.545861 (0.0000)	22.61789 (0.0000)
King-Wu	25.44067 (0.0000)	6.545861 (0.0000)	16.70756 (0.0000)
Standardized Honda	26.45809 (0.0000)	7.847776 (0.0000)	20.42835 (0.0000)
Standardized King- Wu	26.45809 (0.0000)	7.847776 (0.0000)	15.24754 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	690.0759 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

Lampiran G. Fixed Effect Model

Dependent Variable: LNPTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/23/20 Time: 12:35
 Sample: 2011 2018
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 264

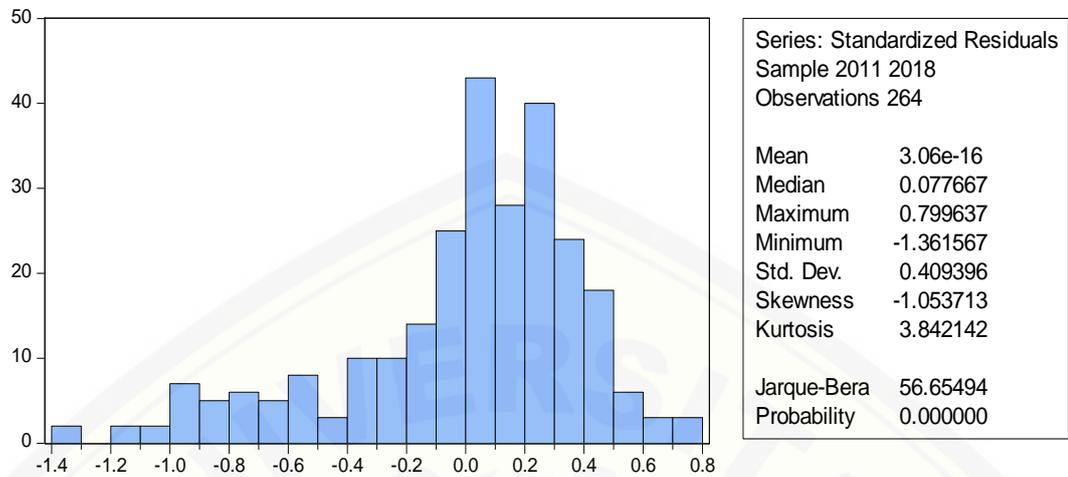
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.60213	0.336282	31.52744	0.0000
LNUMK	0.048272	0.025566	1.888120	0.0603
LNPDRB	0.271374	0.056342	4.816556	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998857	Mean dependent var	14.48636
Adjusted R-squared	0.998688	S.D. dependent var	0.996525
S.E. of regression	0.036103	Akaike info criterion	-3.681982
Sum squared resid	0.298477	Schwarz criterion	-3.207898
Log likelihood	521.0217	Hannan-Quinn criter.	-3.491481
F-statistic	5886.823	Durbin-Watson stat	1.489457
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H. Hasil Uji Normalitas



Lampiran I. Uji Multikolinieritas

	LNUMK	LNPDRB
LNUMK	1.000000	0.053790
LNPDRB	0.053790	1.000000

Lampiran J. Uji Heteros Kedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 02/23/20 Time: 14:03

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNUMK	-0.006810	0.013910	-0.489558	0.6249
LNPDRB	-0.000193	0.030654	-0.006281	0.9950
C	0.054518	0.079460	0.686112	0.4933
R-squared	0.227486	Mean dependent var	0.011469	
Adjusted R-squared	0.112789	S.D. dependent var	0.009057	
S.E. of regression	0.008531	Akaike info criterion	-6.567382	
Sum squared resid	0.016665	Schwarz criterion	-6.093298	
Log likelihood	901.8944	Hannan-Quinn criter.	-6.376880	
F-statistic	1.983373	Durbin-Watson stat	2.385245	
Prob(F-statistic)	0.001762			

Lampiran K. Common Effect Model

Dependent Variable: LNPTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/23/20 Time: 12:33
 Sample: 2011 2018
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.92780	2.927271	5.441177	0.0000
LNUMK	0.023038	0.129639	0.177707	0.8592
LNPDRB	-0.063802	0.334661	-0.190648	0.8490
D1	1.745271	7.683510	0.227145	0.8206
D2	-18.44613	7.702245	-2.394904	0.0177
D3	-9.687328	6.113437	-1.584596	0.1150
D4	-7.784311	12.65112	-0.615306	0.5392
D5	-18.57795	11.06264	-1.679341	0.0950
D6	4.096483	6.441361	0.635965	0.5257
D7	-7.355557	4.149216	-1.772758	0.0781
D8	-6.864640	4.836821	-1.419246	0.1577
D9	-10.11272	3.735772	-2.706996	0.0075
D10	-6.787001	5.488973	-1.236479	0.2180
D11	-4.049893	4.586769	-0.882951	0.3785
D12	-5.172992	4.468701	-1.157605	0.2487
D13	-1.125618	4.464450	-0.252129	0.8013
D14	-5.889283	3.209626	-1.834881	0.0683
D15	-1.857223	5.037296	-0.368694	0.7128
D16	-5.964463	3.692416	-1.615328	0.1082
D17	-5.973162	3.048358	-1.959468	0.0517
D18	-2.947845	6.107620	-0.482650	0.6300
D19	-1.931442	4.728339	-0.408482	0.6834
D20	-8.481690	3.357733	-2.526016	0.0125
D21	-3.058158	4.953497	-0.617374	0.5378
D22	-7.243107	8.081150	-0.896296	0.3714
D23	-7.774093	3.757793	-2.068792	0.0401
D24	-7.866782	3.509506	-2.241564	0.0263
D25	-3.943952	3.067150	-1.285869	0.2003
D26	-3.079422	3.633698	-0.847462	0.3980
D27	-4.467337	3.127460	-1.428423	0.1551
D28	-2.506914	3.356753	-0.746827	0.4562
D29	-6.322467	3.596520	-1.757940	0.0806
D30	-7.408394	3.545816	-2.089334	0.0382
D31	-4.893235	3.430816	-1.426260	0.1557

D32	-9.898118	5.999246	-1.649894	0.1009
D1LNUMK	0.463766	0.234251	1.979787	0.0494
D2LNUMK	-1.340330	0.678672	-1.974931	0.0499
D3LNUMK	-0.372002	0.707586	-0.525734	0.5998
D4LNUMK	0.153876	0.251686	0.611384	0.5418
D5LNUMK	-0.764018	0.626450	-1.219600	0.2244
D6LNUMK	1.103123	0.537603	2.051927	0.0418
D7LNUMK	-0.115761	0.205035	-0.564593	0.5731
D8LNUMK	0.081283	0.204908	0.396682	0.6921
D9LNUMK	-0.399512	0.256917	-1.555026	0.1219
D10LNUMK	-0.031063	0.303170	-0.102460	0.9185
D11LNUMK	0.039462	0.251652	0.156812	0.8756
D12LNUMK	0.016568	0.295973	0.055979	0.9554
D13LNUMK	0.054870	0.236929	0.231590	0.8171
D14LNUMK	0.116780	0.255746	0.456625	0.6485
D15LNUMK	-0.049758	0.290239	-0.171440	0.8641
D16LNUMK	-0.177900	0.230838	-0.770668	0.4420
D17LNUMK	-0.106215	0.197633	-0.537437	0.5917
D18LNUMK	0.374646	0.712367	0.525917	0.5997
D19LNUMK	0.150998	0.238351	0.633509	0.5273
D20LNUMK	-0.438136	0.372401	-1.176518	0.2411
D21LNUMK	0.138977	0.287501	0.483397	0.6295
D22LNUMK	-0.135360	0.167195	-0.809590	0.4193
D23LNUMK	-0.208839	0.227016	-0.919930	0.3590
D24LNUMK	-0.001141	0.224489	-0.005083	0.9960
D25LNUMK	0.524740	0.264293	1.985445	0.0488
D26LNUMK	0.068197	0.270770	0.251865	0.8015
D27LNUMK	0.532887	0.333351	1.598578	0.1118
D28LNUMK	0.658576	0.252479	2.608436	0.0099
D29LNUMK	-0.156869	0.260048	-0.603231	0.5472
D30LNUMK	-0.116949	0.282119	-0.414540	0.6790
D31LNUMK	0.152733	0.293634	0.520147	0.6037
D32LNUMK	0.039678	0.810535	0.048952	0.9610
D1LNPDRB	-0.812248	0.906517	-0.896010	0.3716
D2LNPDRB	2.909495	1.320162	2.203892	0.0289
D3LNPDRB	1.191240	1.329141	0.896248	0.3714
D4LNPDRB	0.378027	1.225352	0.308505	0.7581
D5LNPDRB	2.325930	1.666917	1.395348	0.1648
D6LNPDRB	-1.803303	1.170876	-1.540131	0.1254
D7LNPDRB	0.699092	0.531015	1.316520	0.1898
D8LNPDRB	0.324573	0.657827	0.493401	0.6224
D9LNPDRB	1.318269	0.607692	2.169305	0.0315
D10LNPDRB	0.564100	0.771243	0.731416	0.4656
D11LNPDRB	0.351356	0.568245	0.618317	0.5372
D12LNPDRB	0.382934	0.645428	0.593303	0.5538
D13LNPDRB	0.118438	0.554250	0.213691	0.8311

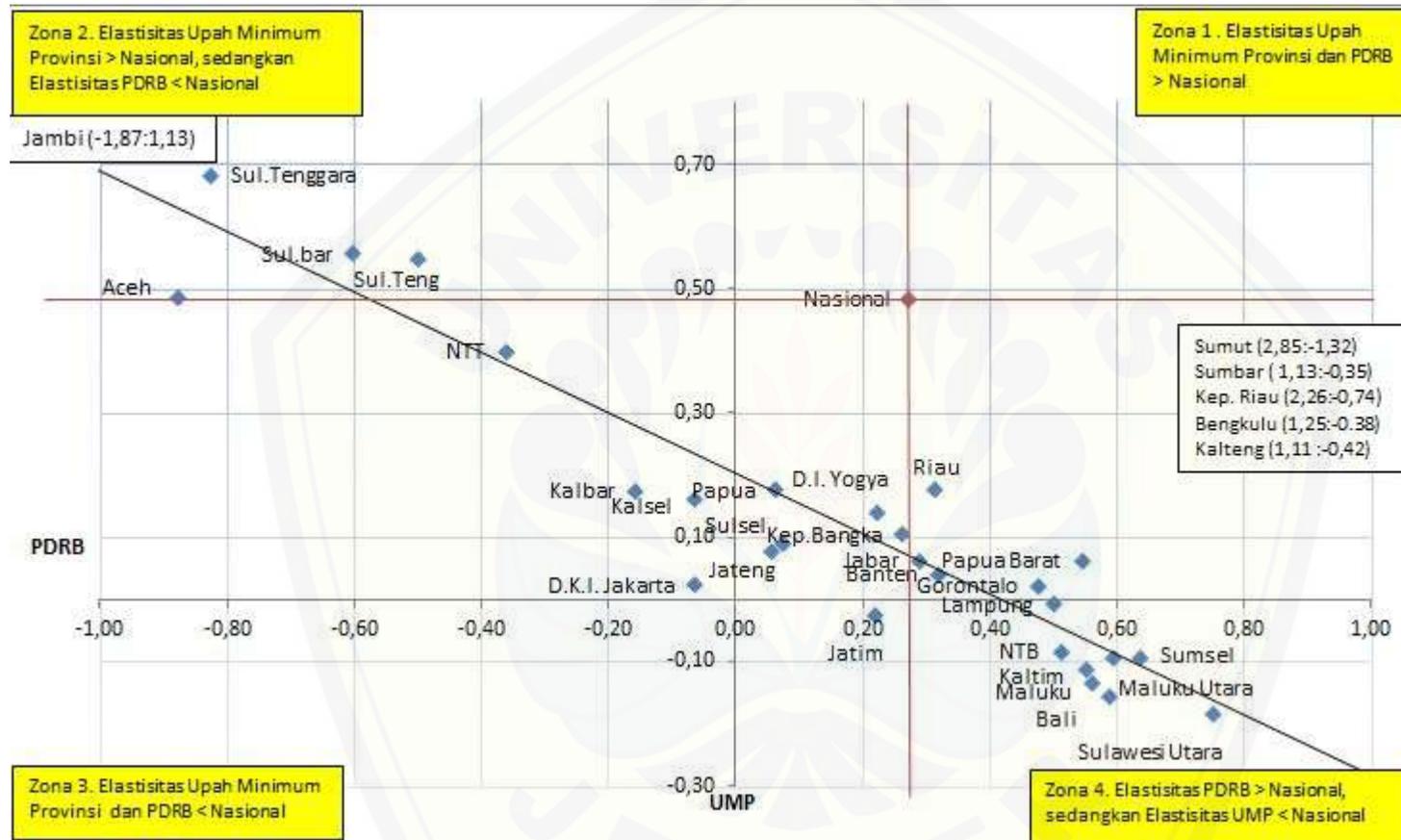
D14LNPDRB	0.285223	0.486778	0.585940	0.5587
D15LNPDRB	0.282848	0.635890	0.444807	0.6570
D16LNPDRB	0.651344	0.532167	1.223946	0.2227
D17LNPDRB	0.575503	0.399622	1.440119	0.1517
D18LNPDRB	-0.296741	1.422185	-0.208651	0.8350
D19LNPDRB	-0.095116	0.650221	-0.146282	0.8839
D20LNPDRB	1.175182	0.667496	1.760583	0.0802
D21LNPDRB	0.000210	0.735239	0.000285	0.9998
D22LNPDRB	0.614269	0.760087	0.808156	0.4202
D23LNPDRB	0.814696	0.557184	1.462165	0.1456
D24LNPDRB	0.538730	0.558069	0.965345	0.3358
D25LNPDRB	-0.434431	0.486844	-0.892340	0.3735
D26LNPDRB	0.137184	0.554205	0.247533	0.8048
D27LNPDRB	-0.538919	0.619744	-0.869583	0.3858
D28LNPDRB	-0.760822	0.530497	-1.434169	0.1534
D29LNPDRB	0.625378	0.613043	1.020121	0.3092
D30LNPDRB	0.657292	0.645081	1.018929	0.3097
D31LNPDRB	0.124556	0.571650	0.217888	0.8278
D32LNPDRB	0.608097	1.580696	0.384702	0.7010

R-squared	0.999406	Mean dependent var	14.48636
Adjusted R-squared	0.999053	S.D. dependent var	0.996525
S.E. of regression	0.030667	Akaike info criterion	-3.851276
Sum squared resid	0.155175	Schwarz criterion	-2.510295
Log likelihood	607.3684	Hannan-Quinn criter.	-3.312429
F-statistic	2832.116	Durbin-Watson stat	2.491899
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran K. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja antar Provinsi di Indonesia
Tahun 2011-2018

Provinsi	α	UMP	PDRB
D.K.I Jakarta	15,93	0,02	-0,06
Aceh	17,67	0,49	-0,88
Sumut	-2,52	-1,32	2,85
Sumbar	6,24	-0,35	1,13
Riau	8,14	0,18	0,31
Kep. Riau	-2,65	-0,74	2,26
Jambi	20,02	1,13	-1,87
Sumsel	8,57	-0,09	0,64
Kep. Bangka	9,06	0,10	0,26
Bengkulu	5,82	-0,38	1,25
Lampung	9,14	-0,01	0,50
Jabar	11,88	0,06	0,29
Banten	10,75	0,04	0,32
Jateng	14,80	0,08	0,05
D.I Yogya	10,04	0,14	0,22
Jatim	14,07	-0,03	0,22
Bali	9,96	-0,15	0,59
NTB	9,95	-0,08	0,51
NTT	12,98	0,40	-0,36
Kalbar	14,00	0,17	-0,16
Kalteng	7,45	-0,42	1,11
Kalsel	12,87	0,16	-0,06
Kaltim	8,68	-0,11	0,55
Sulut	8,15	-0,19	0,75
Gorontalo	8,06	0,02	0,47
Sulteng	11,98	0,55	-0,50
Sulsel	12,85	0,09	0,07
Sulbar	11,46	0,56	-0,60
Sul.Tenggara	13,42	0,68	-0,82
Maluku	9,61	-0,13	0,56
Maluku Utara	8,52	-0,09	0,59
Papua	11,03	0,18	0,06
Papua Barat	6,03	0,06	0,54
Indonesia	10,60	0,48	0,27

Lampiran J. Perbandingan Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum di Indonesia Tahun 2011-2018



Lampiran M. Persebaran Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2018

